



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG**



# LAPORAN KINERJA BPS KAB. BANDUNG 2020

## KATA PENGANTAR

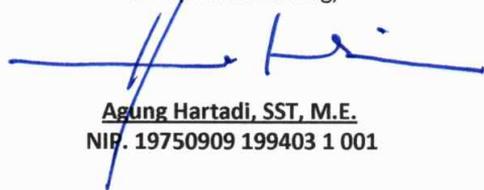
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 BPS Kabupaten Bandung disusun untuk memberi gambaran sekaligus sebagai penyampaian informasi kinerja yang terukur mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung yang telah dan seharusnya dicapai. Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai suatu upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja.

Dalam menerapkan manajemen kinerja, salah satu fondasi utama adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Soreang, 23 Februari 2021

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bandung,



**Agung Hartadi, SST, M.E.**  
NIP. 19750909 199403 1 001

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Maksud dan Tujuan .....	2
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung .....	2
Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Bandung.....	5
Potensi dan Permasalahan .....	15
Sistematika Penyajian Laporan.....	17
PERENCANAAN KINERJA.....	18
Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2020-2024 .....	18
Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2020 .....	25
AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Terhadap Target Perjanjian Kinerja 2020 .....	30
Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020 .....	41
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Terhadap Target Renstra 2020-2024.....	44
Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020.....	49
Sensus Penduduk 2020.....	50
Pendataan Potensi Desa 2020.....	63
Survei Dstatistik PertanianTanaman Pangan / Ubinan .....	66
Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA.....	71
Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung 2020 .....	75
Kinerja Anggaran Tahun 2020. ....	79
Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh tahun 2020 .....	97
PENUTUP .....	98
Tinjauan Umum .....	98
Tindak Lanjut .....	99
LAMPIRAN - LAMPIRAN .....	100
Lampiran 1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2020-2024 .....	100
Lampiran 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2020.....	102
Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2020 (Review) .105	

Lampiran 4. Rincian SDM ASN BPS Kabupaten Bandung akhir 2020 .....	108
Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2020 .	109
Lampiran 6. Target – Realisasi Kegiatan/ <i>Response Rate</i> Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020 .....	116
Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2020 .....	121
Lampiran 8. Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2020 .....	123

## **Daftar Tabel**

### **Nomor dan Uraian Tabel**

Tabel 1	Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Bandung Menurut Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Statistis	5
Tabel 2	Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan	7
Tabel 3	Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur	9
Tabel 4	Daftar Nama Petugas Pelaksana Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) pada Kegiatan Pendataan SP2020.	11
Tabel 5	Daftar Mutasi Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020	12
Tabel 6	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2020-2020	23
Tabel 7	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020	25
Tabel 8	Kontribusi Unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator	27
Tabel 9	Jumlah Anggaran Menurut Program Kegiatan BPS Kabupaten Bandung 2020	29
Tabel 10	Capaian Kinerja Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan	31
Tabel 11	Persentase Penggunaan Data Sebagai Rujukan Utama dan Perencanaan Evaluasi Pembangunan Nasional	33
Tabel 12	Capaian Kinerja Tujuan : Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN	35
Tabel 13	Capaian Kinerja Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN	36
Tabel 14	Capaian Kinerja Tujuan : Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasidan Reformasi Birokrasi	40
Tabel 15	Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020.	41
Tabel 16	Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra Tahun 2020-2024	44
Tabel 17	Perbedaan Target PK dan Target Renstra Tahun 2020	46
Tabel 18	Jadwal Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020	56
Tabel 19	Jumlah Petugas Sensus dan Koseka Per Kecamatan Kabupaten Bandung 2020	57
Tabel 20	Jenis Daftar, Frekuensi Pengumpulan dan Jadwal Pengumpulan Data Survei Statistik Tanaman Pangan	67
Tabel 21	Jumlah Sampel Survei Statistik Tanaman Pangan Tahun 2020	68
Tabel 22	Jadwal Kegiatan KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020	73

Tabel 23	Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun BPS Kabupaten Bandung Tahun 2017-2020	75
Tabel 24	Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2020	77
Tabel 25	Perbandingan Pagu Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020	80
Tabel 26	Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2020 Menurut Program	81
Tabel 27	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2019-2020 Menurut Program	82
Tabel 28	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2019-2020 Menurut Output Program DMPTTL Tahun 2020	83
Tabel 29	Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2020 Menurut Jenis Belanja	84
Tabel 30	Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020	87
Tabel 31	Perubahan Bobot Penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2020 dan Tahun 2019	93
Tabel 32	Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020	94
Tabel 33	Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020	95

## **Daftar Gambar Nomor dan Uraian**

Gambar 1. Struktur Organisasi Lama BPS Kabupaten Bandung .....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Baru BPS Kabupaten Bandung .....	4
Gambar 3. Persentase Staf Pelaksana Fungsional Statistisi Menurut Jenjang Jabatan Fungsional.....	6
Gambar 4. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jenis Kelamin .....	6
Gambar 5. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang.....	8
Gambar 6. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur	10
Gambar 7. Hubungan antara Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung.....	24
Gambar 8. Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2020.....	33
Gambar 9. Rakorkab dan Rakorcab dalam rangka Sosialisasi Penduduk Online 2020.....	53
Gambar 10. Rapat Koordinasi Pertemuan Agen SP 2020 BPS Kabupaten Bandung .....	54
Gambar 11. Pengarahan dan Pendampingan para pegawai di dinas/instansi Pemkab Bandung .....	54
Gambar 12. Pelaksanaan Lapangan Sensus Penduduk Online 2020 terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bandung.....	55
Gambar 13. Pelatihan Online Sensus Penduduk 2020 melalui siaran TVRI .....	59
Gambar 14. Pelaksanaan Lapangan Kegiatan Sensus Penduduk 2020 .....	59
Gambar 15. Alur Dokumen Sensus Penduduk 2020 .....	62
Gambar 16. Kegiatan Pengolahan Sensus Penduduk 2020 BPS Kabupaten Bandung .....	63
Gambar 17. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (PODES) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020 .....	65
Gambar 18. Kegiatan Lapangan Statistik Tanaman Pangan Tahun 2020 .....	70
Gambar 19. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020.....	74

Gambar 20. Komposisi Alokasi Anggaran Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020 ..85

Gambar 21. Komposisi Realisasi Anggaran Jenis Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun  
2020 .....85

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Bandung membutuhkan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaannya. Guna mendukung hal tersebut BPS Kabupaten Bandung melakukan penyusunan perencanaan strategis untuk lima tahun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 BPS Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024. Sebagai catatan, Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 BPS Kabupaten Bandung merupakan tahun pertama pelaksanaan di tahun ini.

Dalam Renstra tersebut terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang harus dicapai BPS pada tahun 2020 yaitu: (1) Penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); (3) Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPS Kabupaten Bandung menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang merupakan gambaran kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan kinerja pencapaian target sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020 yang ditetapkan setiap awal tahun.

## Maksud dan Tujuan

Selain untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maksud penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Bandung atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Selain itu penyusunan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama tahun 2020.

## Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung merupakan lembaga non departemen/kementerian yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

### Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

- (1). BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Propinsi.
- (2). BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala

## Tugas

BPS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Fungsi

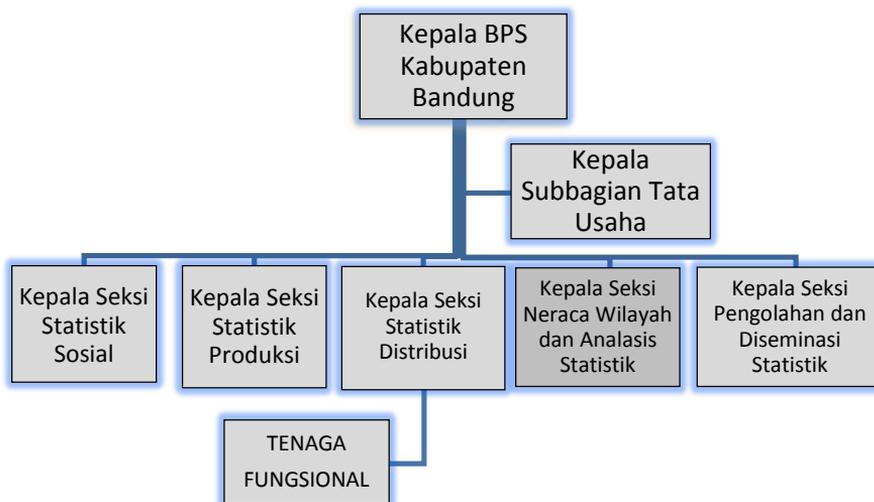
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabupaten Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS kabupaten.

## Susunan Organisasi

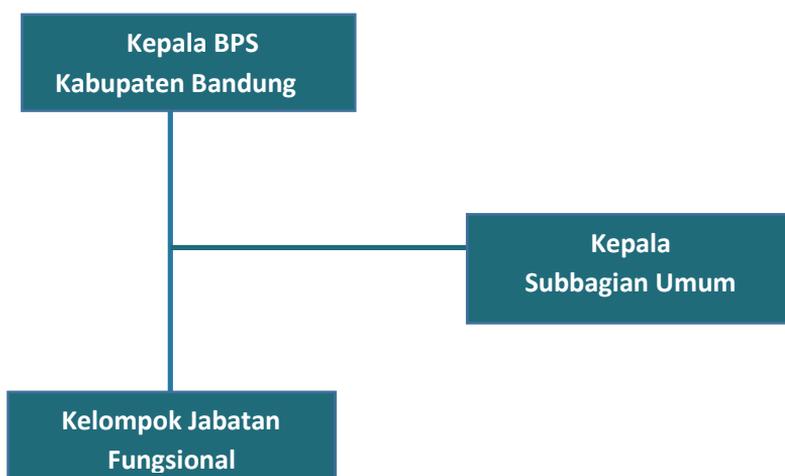
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, yaitu :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Statistik Sosial;
- d. Kepala Seksi Statistik Produksi;
- e. Kepala Seksi Statistik Distribusi;
- f. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
- g. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;



**Gambar 1. Struktur Organisasi Lama BPS Kabupaten Bandung**

Namun di akhir tahun 2020, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020, terdapat perubahan struktur organisasi sebagai berikut :



**Gambar 2. Struktur Organisasi Baru BPS Kabupaten Bandung**

## Sumber daya manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung

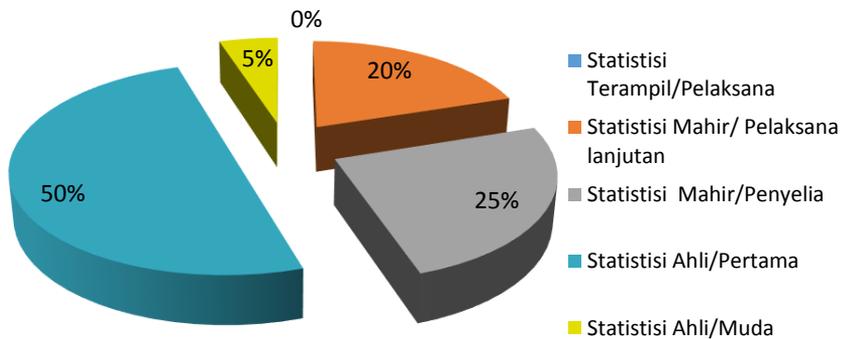
Dalam menunjang kegiatannya BPS Kabupaten Bandung di pimpin oleh seorang pejabat Struktural Eselon III/Administrator yang membawahi 5 (lima) Kepala Seksi dan 1 (satu) Kepala Subbagian atau membawahi 6 orang pejabat Struktural Eselon IV/Pengawas. Adapun jumlah pegawai non struktural/pelaksana sebanyak 27 orang, terdiri dari: 12 orang staf dan 15 orang Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Berdasarkan Jabatannya Pegawai non Struktural/Pelaksana terbagi dalam jabatan fungsional umum sebanyak 7 orang pegawai (25,9%) dan jabatan fungsional statistisi sebanyak 20 orang pegawai (74,1%). Total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPS Kabupaten Bandung sebanyak 34 orang ditambah dengan 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau Honorer. Selama tahun 2020 terjadi pengurangan Pegawai ASN sebanyak 3 orang dibandingkan awal tahun lalu, dikarenakan adanya mutasi pindah keluar satker dan berakhirnya Masa Bakti Pegawai.

**Tabel 1. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Bandung Menurut Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Statistisi**

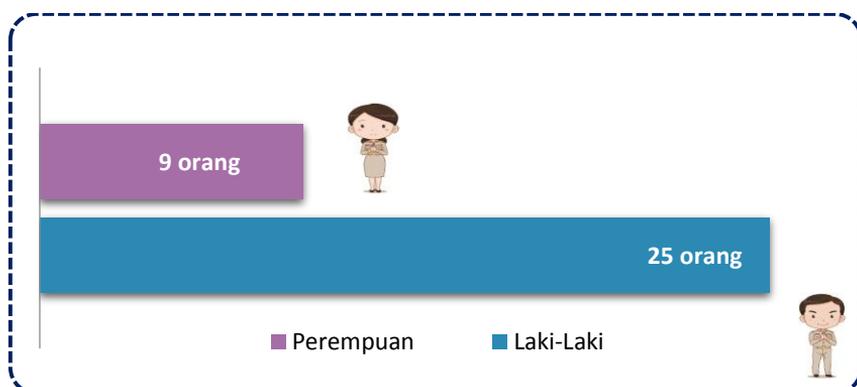
No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural Eselon III / Administrator	1
2	Struktural Eselon IV/ Pengawas	6
3	Staf Pelaksana Fungsional Umum	7
4	Staf Pelaksana Fungsional Statistisi :	20
	- Statistisi Terampil/Pelaksana	0
	- Statistisi Mahir/ Pelaksana lanjutan	4
	- Statistisi Mahir/Penyelia	5
	- Statistisi Ahli/Pertama	10
	- Statistisi Ahli/Muda	1

Dari sebanyak 20 orang pegawai pejabat fungsional statistisi tersebut, 4 orang pegawai (20%) merupakan statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan, 5 orang pegawai (25%) merupakan statistisi Mahir/Penyelia, 10 orang pegawai (50%) merupakan Statistisi Ahli/Pertama dan 1 Orang Pegawai (5% ) merupakan Statistisi Ahli/Muda .



**Gambar 3. Persentase Staf Pelaksana Fungsional Statistisi Menurut Jenjang Jabatan Fungsional**

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebanyak 25 orang pegawai atau sebesar 73,5% dari total 34 orang pegawai. Sementara itu pegawai perempuan tercatat sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 26,5% persen dari total seluruh pegawai.



**Gambar 4. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Jenis Kelamin**

Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Sebanyak 6 orang pegawai (17,6%) berlatar belakang pendidikan magister (S-2), 18 orang pegawai (53%) dengan tingkat pendidikan sarjana atau Diploma IV (DIV/S-1), 3 orang pegawai (8,8%) dengan tingkat pendidikan diploma-3 (D-III), 7 orang pegawai (20,6%) berpendidikan SMA. Jumlah Pegawai berlatar belakang pendidikan Magister (S-2) tahun ini bertambah 2 orang karena adanya mutasi masuk pegawai yaitu Agung Hartadi, S.ST.,M.E. (Kepala BPS Kabupaten Bandung) dan Deni Riyadi, S.ST., M.A.P. (Kepala Seksi Statistik Distribusi).

**Tabel 2. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SMA	7
2	D III	3
3	D-IV / S-1	18
4	S-2	6
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

Komposisi pegawai BPS Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dan ruang, yaitu Pegawai Golongan IV berjumlah 3 orang terdiri dari Pembina (IV/a) sebanyak 3 orang pegawai. Sedangkan Pegawai Golongan III terdapat sebanyak 28 orang yang terdiri dari : Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 9 orang, Penata (III/c) sebanyak 5 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 9 orang dan Penata Muda (III/a) sebanyak 5 orang pegawai. Adapun untuk Pegawai Golongan II sebanyak 3 orang, dengan rincian : Pengatur Tingkat I (II/d) sebanyak 2 orang dan Pengatur Muda (II/a) Sebanyak 1 orang.



**Gambar 5. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Pangkat/Golongan Ruang**

Berdasarkan komposisi tersebut terlihat bahwa pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dan pangkat Penata Tingkat I (III/d) merupakan pangkat/golongan ruang dengan jumlah pegawai terbanyak di BPS Kabupaten Bandung yaitu masing- masing sebesar 26,5 %, disusul dengan Penata (III/c) dan Penata Muda (III/a) yaitu masing - masing sebanyak 14,7 %, Pembina (IV/a) sebanyak 8,8% dan Pengatur Tingkat I (II/d) yaitu sebesar 5,9 %. Persentase terendah pada pangkat Pengatur Muda (II/a) sebesar 2,9 %.

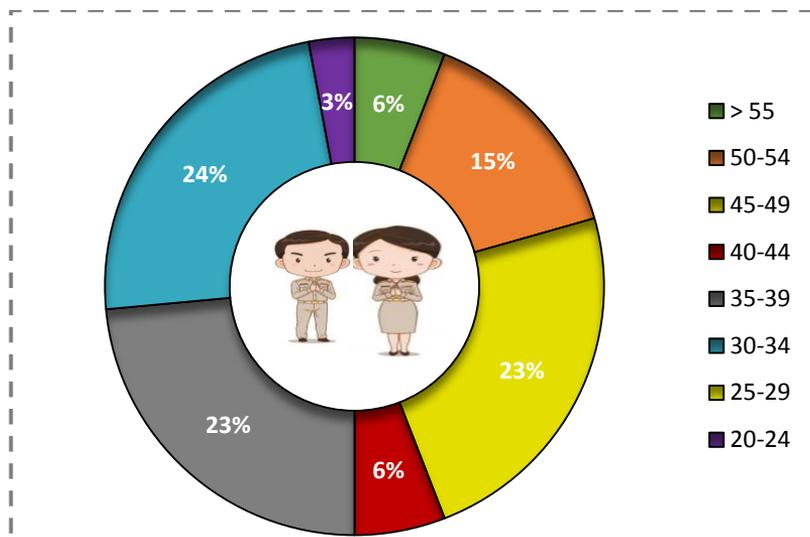
Dibandingkan dengan tahun lalu Jumlah ASN dengan golongan ruang III/d bertambah 2 orang karena adanya mutasi masuk dari Kabupaten Bandung Barat dan adanya kenaikan pangkat/golongan. Demikian juga untuk pegawai golongan III/a bertambah 1 orang karena adanya kenaikan pangkat/golongan tahun ini. Sedangkan untuk golongan ruang IV/b berkurang 1 orang karena berakhirnya Masa Bakti Pegawai. Untuk golongan ruang III/c berkurang 1 orang mutasi keluar satker. Dan untuk golongan II/c terjadi pengurangan 1 orang karena adanya kenaikan pangkat/golongan menjadi II/d.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, jumlah pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung terbanyak berada pada kelompok umur 30-35 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 24% dari total pegawai, diikuti oleh kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 6 orang atau 16%, kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 2 orang pegawai atau sebesar 6% , kelompok Umur 50-55 tahun, 4 orang pegawai atau sebesar (11%) pada kelompok umur 36-39 tahun, dan 10 orang pegawai (27%) pada kelompok umur 55 tahun keatas 6 orang pegawai atau sebesar 16%.

**Tabel 3. Jumlah Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (orang)
1	> 55	2
2	50-54	5
3	45-49	8
4	40-44	2
5	35-39	8
6	30-34	8
7	25-29	0
8	20-24	1
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

Secara keseluruhan, sebagian besar pegawai BPS Kabupaten Bandung berada pada kelompok umur di bawah 50 tahun yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 73 %. Hal ini menjadi potensi SDM yang menggembirakan karena secara fisik relatif muda sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja satker BPS Kabupaten Bandung .



**Gambar 6. Persentase Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Menurut Kelompok Umur**

Pada akhir tahun 2020 ini jumlah tenaga lapangan yaitu Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah KSK pada akhir tahun 2019. Pada akhir tahun 2020 ini jumlah KSK tercatat sebanyak 13 orang, dan 2 orang lainnya sedang menjalani tugas belajar S-2.

Jika dibandingkan dengan jumlah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 31 Kecamatan, maka jumlah Kecamatan yang kosong atau belum terisi petugas KSKnya sebanyak 16 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Rancabali, Cimaung, Kertasari, Pacet, Ciparay, Cikancung, Nagreg, Solokanjeruk, Canguang, Soreang, Cilengkrang, Cimenyan, Pasirjambu, Paseh, Margaasih, Margahayu, Bojongsoang dan Katapang.

Dalam rangka mengantisipasi berkurangnya tenaga lapangan (KSK) di tingkat kecamatan, maka pada kegiatan Pendataan SP2020 tahun 2020, beberapa pegawai staf pelaksana yang ada dan ditambah dengan mengangkat beberapa orang Mitra Statistik

Kecamatan yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana KSK pada Kecamatan-kecamatan yang kosong tersebut, dengan rincian seperti pada tabel 5 berikut.

**Tabel 4. Daftar Nama Petugas Pelaksana Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) pada Kegiatan Pendataan SP2020**

No	Nama	NIP	Gol.	Jabatan Definitif	Jabatan Rangkap
1	Hendra, S.Si	198610032010031002	III/d	KSK Ciwidey	Koseka Rancabali
2	Katamso Noto Santoso, S.Tr.Stat.	199705272019121003	III/a	Staf Seksi Statistik Sosial	Koseka Pasirjambu
3	Dadan Somantri	198506282007011004	II/a	Staf Subbagian Tata Usaha	Koseka Pacet
4	Ribut Sumaryanto, SAP	196612121989031005	III/d	Staf Seksi Statistik Sosial	Koseka Paseh
5	Adisty Septiyani, S.Si	198309152009022008	III/b	Staf Seksi Statistik Neraca Wilayah	Koseka Cilengkrang
6	Didin Tajudin, SST, M.M.	197010051991021002	IV/a	Kepala Seksi Statistik Produksi	Koseka Ciparay
7	Dani Wildan Hakim, S.Si	198211162011011013	III/c	KSK	Koseka Nagreg
8	Peri Gandara, S.Si, M.Eng, M.T	197502191996121001	IV/a	Staf Seksi Statistik Produksi	Koseka Solokanjeruk
9	Listya Putri, A.Md	198803052011012019	III/a	Staf Seksi Statistik IPDS	Koseka Bojongsoang
10	Dewi Rajaeti	197201261993032002	III/b	Staf Seksi Statistik Produksi	Koseka Soreang
11	Deni Riyadi SST, M.A.P.	197503051998031003	III/d	Staf Seksi Statistik Distribusi	Koseka Margaasih
12	Ria Yunita Emkaen, S.Si., ME.	198206022009022008	III/c	Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah	Koseka Margahayu
13	Tutut Sudaryanti, SST	197308051995122001	III/d	Kepala Seksi Statistik IPDS	Koseka Katapang

Pada tahun awal tahun sampai dengan akhir tahun 2020 Staf maupun Struktural di BPS Kabupaten Bandung mengalami mutasi, baik mutasi pindah dalam satker/antar satker, maupun mutasi kenaikan jabatan Fungsional.

Pada tahun 2020 jumlah staf pelaksana dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) di kantor BPS Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Pada awal tahun 2020 jumlah staf tercatat sebanyak 15 orang. Pada pertengahan tahun 2020 tercatat penurunan jumlah staf pelaksana sebesar 3 orang, yaitu 1 orang mutasi pindah antar satker yaitu mutasi ke BPS Provinsi Jawa Barat, 1 orang melimpah menjadi Staf Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan 1 orang pensiun.

Penurunan pun terjadi pada Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), dimana pada awal tahun 2020 jumlah KSK tercatat sebanyak 16 orang. Namun pada pertengahan tahun 2020 tercatat penurunan jumlah KSK sebanyak 1 orang, yaitu melimpah menjadi Staf Pemda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Rincian para pegawai yang mengalami mutasi secara lengkap seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Daftar Mutasi Pegawai ASN BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

No	Nama	N I P	Jabatan lama / Pangkat Gol. Lama	Jabatan Baru / Pangkat Gol. Baru	T M T
1	Ribut Sumaryanto, SAP	19661212 19890310 05	Statistisi Penyelia Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Bandung Barat	Statistisi Penyelia Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bandung	01/01/2020
2	Katamso Noto Santoso, S.Tr.Stat.	19970527 20191210 03	CPNS Staf Seksi Statistik Sosial	PNS Staf Seksi Statistik Sosial	01/12/2020
3	Ir. Ruslan	19620109 198601 1 001	Kepala Kantor BPS Kabupaten Bandung	Pensiun 01/02/2020	TMT 01/02/2020

No	Nama	N I P	Jabatan lama / Pangkat Gol. Lama	Jabatan Baru / Pangkat Gol. Baru	T M T
4	Tris Subhianto, SE	19671219 19940110 01	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Garut	Staf Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bandung	06/02/2020
5	Agung Hartadi, SST.,M.E.	19671219 19940110 01	Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen BPS Provinsi Jawa Barat	Kepala Kantor BPS Kabupaten Bandung	07/02/2020
6	Ririen Ritmamella Wurisantani	19820302 200801 2 017	Staf Seksi Statistik Sosial	Staf Subbagian Umum, Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Jawa Barat	01/03/2020
7	Peri Gandara, S.Si, M.Eng, MT	19750219 19961210 01	Statistisi Ahli Pertama Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Bandung	Statistisi Ahli Pertama Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Bandung	01/03/2020
8	Dra. Adah Saadah	19620316 19900320 02	Kepala Seksi Statistik Distribusi	Pensiun	01/04/2020
9	Tris Subhianto, SE	19671219 19940110 01	Staf Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bandung	Staf Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Bandung	01/05/2020
10	Boyke	19831011 20080110 08	Pengatur (II/c)	Pengatur Tingkat I (II/d)	01/04/2020
11	Neng Susilawati, A.Md	19890715 20110120 12	Pengatur Tingkat I (II/d)	Penata Muda (III/a)	01/04/2020
12	Tris Subhianto, SE	19671219 19940110 01	Staf Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bandung	Staf Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Bandung	01/05/2020
13	Ayi Ruskandar	19620521 199103 1 005	Staf Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik	Pensiun TMT 01/06/2020	01/06/2020
14	Ahmad Fadhly, SE	19831031 20100310 01	KSK Margahayu	Melimpah menjadi Staf Pemda Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara	01/07/2020

No	Nama	N I P	Jabatan lama / Pangkat Gol. Lama	Jabatan Baru / Pangkat Gol. Baru	T M T
15	Deni Riyadi, SST, M.A.P.	19750305 19980310 03	Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Cimahi	Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kab Bandung	03/07/2020
16	Tris Subhianto, SE	19620521 199103 1 005	Staf Seksi Statistik Distribusi Kabupaten Bandung	Melimpah menjadi Staf Analis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	01/09/2020
17	Neng Susilawati, A.Md	19890715 20110120 12	Bendahara Pengeluaran	Penata Usaha Keuangan/Operator SAIBA	01/09/2020
18	Boyke	19831011 20080110 08	Pengelola Barang Milik Negara	Bendahara Pengeluaran	01/09/2020
19	Rahmat Burhani, S.Sos	19850704 200604 1 003	Penata Usaha Keuangan/Operator SAIBA	Pengelola Barang Milik Negara	01/09/2020
20	Agung Hartadi, SST.,M.E.	19671219 19940110 01	Penata Tingkat I (III/d)	Pembina (IV/a)	01/10/2020
21	Hendra, S.Si	19861003 20100310 02	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	01/10/2020

## Potensi dan Permasalahan

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan perstatistikan di BPS Kabupaten Bandung.

Salah satu potensi yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Bandung adalah kualitas SDM nya yang cukup baik, dimana sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi.

Formasi Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), yang merupakan ujung tombak dalam setiap kegiatan pendataan atau pencacahan, di BPS Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 13 (tiga belas) KSK aktif lapangan. Formasi ini hanya dapat memenuhi sebagian dari total 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kabupaten Bandung. Karenanya, beberapa KSK kemudian mengemban jabatan rangkap lebih dari satu kecamatan. Selain itu kekurangan KSK sebagai koordinator pada tingkat kecamatan disiasati dengan pengangkatan beberapa pegawai staf pelaksana yang ada, ditambah dengan beberapa orang Mitra Statistik Kecamatan yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana KSK. Dengan strategi yang dijalankan didukung dengan semangat *sabilulungan* maka kegiatan-kegiatan besar di BPS Kabupaten Bandung relatif dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun 2020 ini, dunia dilanda pandemi Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus Sars-Cov-2. Sejatinya sebagian besar aktifitas penduduk dibatasi ruang geraknya di berbagai sektor tidak terkecuali sektor jasa pemerintahan. Pada masa awal wabah ini masuk ke Indonesia, kegiatan perkantoran dibatasi termasuk kegiatan perkantoran di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Pemerintah pun memberlakukan aturan bekerja di rumah atau yang dikenal dengan istilah *Work From Home* (WFH) untuk pegawai dengan mengikuti kaidah yang berlaku. Beberapa target kegiatan ada yang dikurangi atau bahkan dihentikan oleh BPS RI. Namun demikian meskipun ada penerapan aturan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO),

dengan semangat sabilulungan seluruh target pekerjaan dapat diselesaikan dengan cukup baik.

Tahun 2020 ini juga merupakan tahun yang istimewa dimana agenda besar sepuluh tahunan yaitu Sensus Penduduk dilaksanakan di tahun ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pandemi akan melanda. Hajat besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan matang menjadi terkendala. Namun demikian, pada akhirnya kegiatan Sensus Penduduk 2020 tetap terlaksana dengan strategi dan teknis yang sudah diatur sedemikian rupa oleh BPS RI menyesuaikan dengan kondisi pandemi serta tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan lapangannya.

Disamping kegiatan besar Sensus Penduduk 2020, berbagai kegiatan rutin lainnya pun cukup banyak baik bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. Target pencacahan dan pemasukan dokumen berbagai kegiatan di BPS Kabupaten Bandung semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan penggunaan data BPS Kabupaten Bandung yang semakin dibutuhkan oleh berbagai pihak. Disisi lain, responden semakin enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus atau survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung, menjadi salah satu kendala dalam memperoleh data yang berkualitas. Apalagi di masa pandemi ini, respon masyarakat, pelaku usaha dan lainnya sebagai responden Survei/Sensus di BPS menjadi menurun. Hal ini dimaklumi karena responden tidak bersedia menerima kedatangan petugas dimana ada ketakutan menjadi perantara menularnya wabah virus corona. Meskipun demikian, responden juga ada yang cukup responsive menerima kedatangan petugas selama petugas pencacah menjalankan tugas sesuai aturan protokol kesehatan.

Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Untuk mensiasati hal ini BPS Kabupaten Bandung gencar melakukan sosialisasi, harapannya agar masyarakat lebih mengenal BPS Kabupaten Bandung, sehingga ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS Kabupaten Bandung lebih kooperatif dalam memberikan jawaban apa adanya.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, BPS Kabupaten Bandung telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Adanya payung hukum ini kemudian menjadi salah satu kekuatan (*strength*) yang dimiliki BPS Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan terutama hubungannya terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kabupaten Bandung disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Bandung; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Bandung, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Bandung; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung tahun 2020.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2020, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung tahun 2020, Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung tahun 2020, dan Realisasi Anggaran tahun 2020
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan saran tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

# PERENCANAAN KINERJA

## Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2020-2024



BPS Kabupaten Bandung berupaya turut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik guna mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi yang disusun BPS Kabupaten Bandung untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah:

***“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”***  
***(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)***

Visi tersebut mengandung makna bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Visi tersebut kemudian dirumuskan menjadi misi BPS yang disusun dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS, serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (peningkatan Kualitas Indonesia Maju), Ke-2 (Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

## MISI 1

*Menyediakan statistik berkualitas Yang berstandar nasional maupun internasional*

## MISI 2

*Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan*

## MISI 3

*Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional*

## MISI 4

*Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah*



Makna dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Menyediakan data statistik bermakna bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007).

Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, aktual, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan.

Berstandar internasional mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kabupaten Bandung akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*.

2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) mengandung makna bahwa BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS Kabupaten Bandung juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran (UU no. 16 tahun 1997).

Hal ini sesuai juga dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-

upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: (i) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; (ii) Pengembangan statistik sebagai ilmu; (iii) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; (iv) Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; (v) Pengembangan sistem informasi statistik; (vi) Peningkatan penyebaran informasi statistik; (vii) Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; (viii) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: (i) Pelaksanaan kegiatan statistik; (ii) Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik.

Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan mengandung makna bahwa Sistem Statistik Nasional merupakan suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan.(UU no. 16 tahun 1997).

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik bermakna bahwa kepuasan masyarakat sebagai pengguna data menjadi tujuan utama. Kepuasan terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Dengan pelayanan yang prima, maka diharapkan BPS Kabupaten Bandung dapat ikut serta mewujudkan Sistem Statistik Nasional.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah. Membangun SDM yang unggul dan adaptif dapat tercermin pada insan statistik yang mampu mewujudkan pengejawantahan nilai nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni **profesional, berintegritas dan amanah.**



Profesional mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

BerIntegritas bermakna bahwa Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)

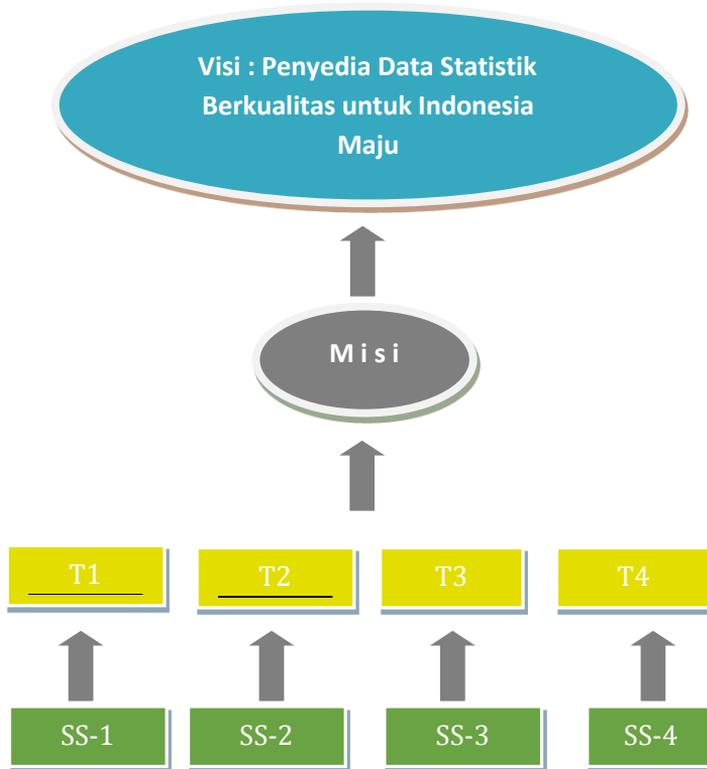
Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.

Penetapan tujuan kemudian dirumuskan guna mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Kabupaten Bandung. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2020-2024

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
(1)		(2)	
T1. Penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1.	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	
T2. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS2.	Meningkatnya penguatan statistik sektoral Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)	
T3. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS3.	Meningkatnya penguatan komitmen Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) terhadap SSN	
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.	Meningkatnya pembangunan SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas dan amanah	

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada gambar 6.



**Gambar 7. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung**

## Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2020

Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen BPS Kabupaten Bandung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja. Penetapan target tahunan dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	10,8
<b>T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	6
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	30

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>			
3.1. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10
<b>T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	61,2
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring dan dilaporkan sebagai laporan interim (triwulanan) setiap triwulanan dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Bandung atas penggunaan anggaran BPS Kabupaten Bandung.

Perjanjian Kinerja yang telah disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat Eselon IV (kepala seksi dan kepala subbagian). Peranan masing-masing unit kerja Eselon IV pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Kontribusi unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwalis	IPDS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk pembangunan		dimanfaatkan sebagai dasar						
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional						*	
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		*			*	*	
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN								
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik						*	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwalis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar						*
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK		*	*	*	*	*
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	*	*	*	*	*	*
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	*					

Keterangan :

\* : Penanggungjawab

\* : Kontributor

Keberhasilan pencapaian target kinerja sangat didukung oleh anggaran yang diberikan untuk satker BPS Kabupaten Bandung. Bentuk dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program kegiatan yang berada di BPS Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTL)
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

**Tabel 9. Jumlah Anggaran Menurut Program Kegiatan BPS Kabupaten Bandung 2020**

No	Program	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)	Rp. 5.773.450.000,-
2.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Rp. 11.026.962.000,-

---

# AKUNTABILITAS KINERJA

## Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2020 Terhadap Target Perjanjian Kinerja 2020

Capaian kinerja merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2020. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK (Perjanjian Kinerja) tahun 2020 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

### Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah *“menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”*, yang dicapai melalui sasaran strategis, *“meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”*.

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan, yaitu :

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
  - Integrasi proses bisnis; serta
  - Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.

- b) Memastikan kemutakhiran data dengan :
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
  - Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
  - Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

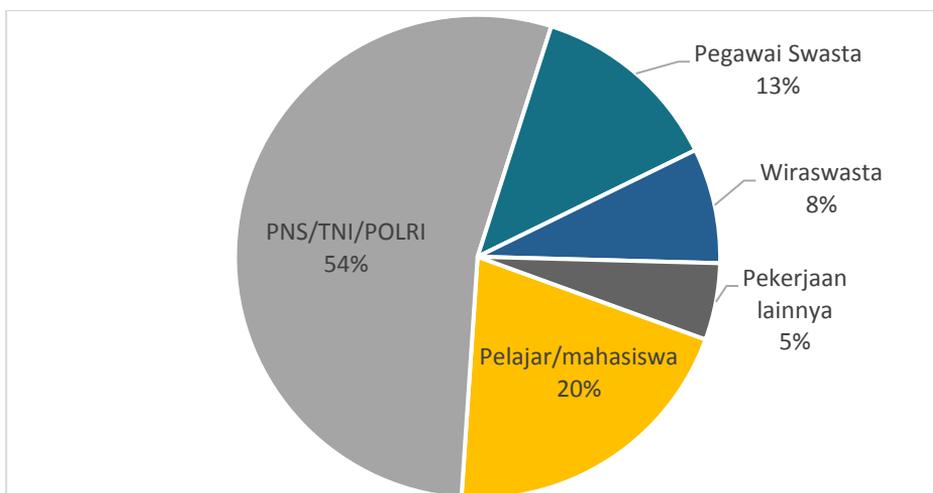
**Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan: Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan**

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas				
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75,00	91,67	120
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	10,8	10,8	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				110

Pada lingkup BPS Kabupaten Bandung, tujuan tersebut telah tercapai dengan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 110 persen. Indikator sasaran strategis *“persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”* tercatat mencapai 120 persen. Sementara indikator sasaran *“persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”* mencapai 100 persen.

Pencapaian tertinggi tujuan pertama berada pada indikator *“persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”* diwujudkan dalam bentuk Survei Kepuasan Data Tahun 2020 (SKD 2020), yang dilaksanakan di PST BPS Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Maret sampai dengan 24 Juni 2020. Jumlah responden SKD 2020 sebanyak 39 responden, melebihi target yang telah ditentukan sebanyak 30 responden. Konsumen yang menjadi responden adalah konsumen yang menerima pelayanan pada 1 Januari 2020 sampai periode akhir pencacahan.

Dari total responden SKD, sebanyak 54 persen merupakan PNS/TNI/Polri yang menggunakan data BPS sebagai rujukan atau dasar pengambilan kebijakan pada dinas/instansi terkait. Sementara 20 persen responden merupakan mahasiswa/pelajar yang mempergunakan data BPS sebagai bahan tugas akhir atau skripsi. Di samping itu, 13 persen pengguna data BPS merupakan pegawai swasta, 8 persen merupakan wiraswasta sedangkan 5 persen merupakan pekerja lainnya.



**Gambar 8. Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2020**

Hasil SKD 2020 menunjukkan sebanyak 87,18 persen konsumen data menggunakan Data BPS sebagai Rujukan Utama dan Perencanaan Evaluasi Pembangunan Nasional sementara 12,82 persen lainnya digunakan untuk kepentingan lain.

**Tabel 11. Persentase Penggunaan Data Sebagai Rujukan Utama dan Perencanaan Evaluasi Pembangunan Nasional.**

Penggunaan Data	Persentase
Sebagai Rujukan Utama	87,18
Sebagai Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional	12,82

Sumber : SKD2020

## Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua, yaitu *“meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN”*, dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu *“penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN”*, melalui 2 (dua) indikator, yaitu (i) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik, dan (ii) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI).

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)

Pada lingkup BPS Kabupaten Bandung, rata-rata capaian tujuan kedua tercatat sebesar 100 persen, begitu pula dengan rata-rata masing indikator sarannya. Hasil ini diperoleh dengan tercapainya target dinas/instansi/lembaga yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik, dan terkumpulnya metadata statistik sektoral yang menjadi target BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2020.

**Tabel 12. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN**

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN				
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	6	6	100
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	30	30	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				100

#### Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah “meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”, dengan sasaran strategis “penguatan statistik sektoral K/L/D/I”, melalui 1 (satu) indikator, yaitu Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

*Pertama*, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

*Kedua*, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

*Ketiga*, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung untuk indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut tercapai dengan baik, yaitu sebesar 100 persen, seperti yang dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

**Tabel 13. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN**

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I				
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10	10	100
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				100

## Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, tujuan ini diukur melalui sasaran strategis “SDM statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”, dengan 2 (dua) indikator, yaitu (i) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan (ii) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis
  - Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)
  - Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
  - Menyempurnakan peraturan kepegawaian
  - Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
  - Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
  - Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)
  - Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family
  - Talent pool untuk suksesi organisasi

- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
  - Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
  - Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
- Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
  - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
  - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
  - Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
  - Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan Smart Office di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- Merumuskan grand design smart office
  - Implementasi smart office di BPS

Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja mempunyai bobot (20).

**Tabel 14. Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi**

Tujuan /Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi				
4.1 SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	61,2	69,28	113,2
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75	78,21	104,28
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				108,74

Nilai rata-rata Capaian Kinerja tujuan keempat BPS Kabupaten Bandung mencapai 108,74 persen. Seluruh indikator mencapai lebih dari 100 persen. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercatat sebesar 69,28 yang berarti telah melampaui target tahun 2020. Sedangkan indikator sasaran persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS tercatat sebesar 78,21 persen, nilai ini juga melampaui target tahun 2020 dengan pencapaian sebesar 104,28 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan keempat dapat tercapai dengan baik. Walaupun demikian, seluruh jajaran BPS Kabupaten Bandung tetap berkomitmen untuk terus berusaha dalam meningkatkan kinerja dan kelengkapan bukti-bukti/dokumentasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dari setiap tahapan SAKIP untuk meningkatkan nilai/point penilaian SAKIP di tahun-tahun yang akan datang.

## Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019 - 2020

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2015-2019. Sementara tahun 2020 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2020-2024. Konsekuensi dari hal ini adalah adanya perbedaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja antara kedua tahun tersebut.

**Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020**

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
TUJUAN STRATEGIS	1. Peningkatan kualitas data statistik	1. Penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
	2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
	3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	3. Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
	4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. S1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
	2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	2. S2. Meningkatnya penguatan statistik sektoral Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)
	3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya manusia BPS	3. S3. Meningkatnya penguatan komitmen Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) terhadap SSN
	4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	4. Meningkatnya pembangunan SDM yang unggul dan adaptif

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
	5. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	berlandaskan nilai profesional, integritas dan amanah

URAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
INDIKATOR SASARAN	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	111,11	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	120
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	120,00	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	100
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100,00	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	100
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	100,00	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	100
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	100,00	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	100
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	100,00	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	113,2
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	96,88	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	104,28

URAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	110,52		
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	90,61			
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	120,00			
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	100,41			
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	120,00			
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	102,23			
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	115,15			
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100,00			
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran</b>	<b>105,79</b>		<b>105,35</b>	

Rata-rata capaian indikator sasaran tahun 2020 terhitung sebesar 105,35. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2019, sebesar 105,79. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah pencapaian ini tidak serta merta

dapat dibandingkan mengingat terdapat perbedaan indikator sasaran pada kedua Renstra dengan periode jangka waktu berbeda.

## Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Terhadap Target Renstra 2020-2024

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung terhadap target Renstra 2020-2024 dihitung berdasarkan realisasi 2020 terhadap target 2020 pada Renstra 2020-2024. Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 16. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra Tahun 2020-2024**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75	91,67	120

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	5,4	10,8	200
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	3,1	6	194
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	10	30	300
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10	10	100
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	61,2	69,28	113,2
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75	78,21	104,28

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024. Selama tahun 2020 dilakukan reuiu terhadap PK BPS tahun 2020 pada bulan November 2020. Sehingga terdapat perbedaan antara target PK tahun 2020 dengan target Renstra tahun 2020. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 17. Perbedaan Target PK dengan Target Renstra Tahun 2020**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Target PK 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75	75

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Target PK 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	5,4	10,8
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	3,1	6
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	10	30
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10	10

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Target PK 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	61,2	61,2
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	75	75

## Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional yang diuraikan ke dalam 24 (dua puluh empat) Program Prioritas.

Kebijakan pemerintah 5 (lima) Prioritas Nasional tersebut adalah :

- 1) **Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**
- 2) **Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**
- 3) **Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja**
- 4) **Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup**
- 5) **Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**

Pada tahun 2020 ini, terdapat beberapa kegiatan sensus/survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung dan diantaranya terdapat beberapa output kegiatan survei pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang masuk ke dalam 3 (tiga) Prioritas Nasional tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Sensus Penduduk 2020, masuk ke dalam **Prioritas Nasional : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**
2. Kegiatan Survei Pendataan Potensi Desa , masuk ke dalam **Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**
3. Kegiatan Survei Statistik Tanaman Pangan dan Survei Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area, masuk ke dalam **Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup**

## Sensus Penduduk 2020

Pembangunan baik nasional maupun daerah memerlukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang komprehensif/menyeluruh di berbagai sektor. Perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan tersebut tentunya membutuhkan data yang akurat, actual dan *up to date*.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

BPS difungsikan sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak terhadap efektivitas pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan guna mewujudkan visi BPS.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Dalam perjalanannya, sensus penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah sensus penduduk ke-7 yang akan dilaksanakan. Selain amanat undang-undang, penyelenggaraan sensus penduduk juga direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kondisi ini tentunya mendorong BPS Kabupaten Bandung untuk menjalankan semua kegiatan dilaksanakan secara maksimal terutama dalam pelaksanaan Sensus Penduduk

lapangan ini. Dikarenakan manfaat data Sensus Penduduk 2020 yang sangat penting untuk dasar pembangunan 10 tahun kedepan dan untuk melihat karakteristik penduduk secara keseluruhan.

Kekuatan data sensus penduduk terletak pada kemampuannya menyediakan statistik dasar secara komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya sampai wilayah administratif terkecil. Data sensus penduduk juga bermanfaat sebagai dasar menghitung parameter-parameter kependudukan, pembentukan kerangka sampel, dan penyusunan proyeksi penduduk. Selain itu, data SP2020 juga sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah

Untuk menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman yang sangat cepat, pelaksanaan SP2020 akan dilakukan dengan beberapa inovasi yang belum pernah dilakukan pada sensus-sensus sebelumnya. Salah satu inovasinya adalah di bidang metodologi sensus, dimana setelah beberapa dekade menggunakan metode tradisional, SP2020 akan beralih ke metode kombinasi (*combined method*) melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Pemanfaatan data administrasi kependudukan untuk kepentingan sensus sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (*full canvassing*) menuju ke *register based census*. Proses menuju ke *full register based census* tidaklah mudah sehingga PBB menyarankan untuk menggunakan kombinasi untuk menjembatani antara metode tradisional dengan penggunaan data registrasi .

Tujuan utama SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju “Satu Data Kependudukan Indonesia”. Dalam mencapai tujuan tersebut, SP2020 memiliki inovasi besar yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi, yaitu SP2020 menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar pelaksanaan SP2020.

Inovasi ini untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SP2020, di mana pada era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, serta pergerakan penduduk semakin dinamis, individualis dan mengutamakan privasi. Tantangan ini dapat berdampak kepada menurunnya kepercayaan pada lembaga pemerintah dan lebih lanjut berakibat kepada rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan SP2020.

Rangkaian kegiatan Sensus Penduduk 2020, sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 diawali dengan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 terutama terkait sosialisasi Sensus Penduduk Online 2020.

Untuk pertama kalinya pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan melakukan wawancara langsung oleh petugas. Kedua, masyarakat dapat mencatatkan dirinya sendiri melalui sensus penduduk online dengan mengakses laman [sensus.bps.go.id](https://sensus.bps.go.id). Pelaksanaan sensus penduduk secara online baru pertama kali dilakukan di SP 2020. Hal tersebut dilakukan BPS untuk mengikuti perkembangan zaman di mana semua dapat dilakukan secara online. Sensus penduduk online dimulai tanggal 15 Februari hingga 29 Mei 2020.

Pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020 yang baru pertama kali dilaksanakan ini, tentu menghadapi berbagai permasalahan/kendala. Diantaranya informasi tentang Sensus Penduduk Online dan manfaatnya masih belum sampai ke semua lapisan masyarakat walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi sebelumnya. Berbagai teknik sosialisasi pun sudah dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung agar seluruh masyarakat dapat mengetahui kegiatan Sensus Penduduk Online. Salah satunya adalah kegiatan Rakorkab (Rapat Koordinasi Kabupaten) serta Rakorcam (Rapat Koordinasi Kecamatan)

oleh BPS Kabupaten Bandung untuk melakukan sosialisasi kepada aparatur pemerintah kabupaten serta pemerintah kecamatan.



**Gambar 9. Rakorkab dan Rakorcab dalam rangka Sosialisasi Penduduk Online 2020**

Kendala lainnya adalah masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang paham mengenai cara melakukan SP Online yang baru mulai diterapkan tahun ini. Salah satu solusinya adalah BPS Kabupaten Bandung membuat konsep acara Ngibar “Ngisi Bareng” dengan melibatkan segenap unsur pegawai organik hingga relawan untuk memandu tata cara pengisian SP Online. Terbukti kegiatan Ngibar ini dapat mendongkrak capaian partisipasi SP Online di wilayah Kabupaten Bandung.



**Gambar 10. Rapat Koordinasi Pertemuan Agen SP 2020 BPS Kabupaten Bandung**

Kegiatan “Ngibar” dalam rangka Sosialisasi tata cara pengisian SP Online 2020 ini diawali dengan rapat koordinasi pertemuan Agen SP 2020 BPS Kabupaten Bandung. Pertemuan melibatkan relawan mitra statistik yang bertugas sebagai “agen” di wilayahnya masing-masing guna mendukung suksesnya SP Online di Kabupaten Bandung. Kegiatan Ngibar juga dilakukan oleh segenap unsur pegawai organik untuk memberikan sosialisasi tata cara pengisian SP Online dengan sasaran para ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bandung.



**Gambar 11. Pengarahan dan Pendampingan para pegawai di dinas/instansi Pemkab Bandung**

Hasil dari rangkaian kegiatan SP Online 2020 yang dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 29 Mei 2020 di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 23,11 persen keluarga atau sekitar 906.667 Penduduk di Kabupaten Bandung telah mencatatkan diri secara mandiri melalui Sensus Penduduk Online. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai BPS Kabupaten Bandung dan relawan Kabupaten Bandung beserta dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung.



**Gambar 12. Pelaksanaan Lapangan Sensus Penduduk Online 2020 terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bandung**

Selama pelaksanaannya, tata Kelola SP2020 mengalami penyesuaian akibat ditetapkannya COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona (SARS-CoV-2) sebagai pandemi oleh *World Health Organization*, dan juga *refocusing* postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Salah satu penyesuaian tata Kelola yang terjadi adalah pada pelaksanaan kegiatan lapangan SP2020. Kegiatan lapangan SP2020 yang melibatkan petugas SP2020, ketua/pengurus satuan lingkungan setempat (SLS), dan masyarakat untuk melakukan pendataan penduduk mengalami penyesuaian khususnya pada beban petugas SP2020 dan penggunaan alat pelindung diri (APD) serta penerapan protokol kesehatan. Di tengah kondisi pandemi ini, peran petugas SP2020 menjadi semakin penting dalam memastikan kualitas data kependudukan yang dikumpulkan tetap optimal.

Dalam kegiatan lapangan Sensus Penduduk 2020, terdapat berbagai macam kegiatan lapangan yang terkait dengan kegiatan SP 2020, diantaranya kegiatan pendataan lapangan secara langsung dengan metode door to door, kegiatan pelaksanaan penjaminan kualitas (PK), kegiatan *Task Force*, dan Kegiatan revisit.

Secara khusus tujuan dari rangkaian pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk 2020 diantaranya kegiatan pendataan lapangan secara langsung secara door to door bertujuan untuk mendata keberadaan seluruh penduduk di suatu wilayah atau SLS (Satuan Lingkungan Setempat). Kemudian kegiatan pelaksanaan penjaminan kualitas (PK) bertujuan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan SP 2020. Kegiatan penjaminan kualitas diharapkan dapat ditemukan indikasi kesalahan sehingga tidak terjadi secara luas dan berkelanjutan serta mengetahui kendala yang terjadi saat pelaksanaan.

Selain itu, kegiatan *Task Force* bertujuan untuk melakukan pencacahan penduduk yang tinggal di wilayah non SLS seperti kawasan hutan, penduduk yang tidak diakui ketua/pengurus SLS, tunawisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni rumah perahu, penduduk suku terasing, penduduk yang tinggal di panti, santri di pesantren, dan sejenisnya. Selanjutnya, kegiatan revisit bertujuan untuk mengecek bahwa semua penduduk baik penduduk lokal maupun penduduk yang pendatang dan apabila masih ditemukan penduduk yang lewat cacah maka perlu dicatat. Adapun jadwal pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 18. Jadwal Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020**

No	Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
1	Pelaksanaan Sensus Penduduk Lapangan	1 - 15 September 2020
2	Penjaminan Kualitas SP 2020	5 September 2020
3	Task Force SP 2020	1 - 30 September
4	Revisit SP 2020	16-30 September 2020

Kegiatan Sensus Penduduk di BPS Kabupaten Bandung, membutuhkan jumlah petugas yang cukup besar. Adapun alokasi kebutuhan petugas Sensus Penduduk BPS Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 19. Jumlah Petugas Sensus dan Koseka Per Kecamatan Kabupaten Bandung 2020**

KODE WILAYAH	KECAMATAN	Jumlah Desa	Jumlah KK	Jumlah SLS	Jumlah Non SLS	Jumlah PS	Jumlah Koseka	Total
10	CIWIDEY	7	30.926	517	12	58	4	62
11	RANCABALI	5	19.523	286	29	41	3	44
20	PASIRJAMBU	10	32.781	562	33	63	5	68
30	CIMAUNG	10	31.455	412	62	60	4	64
40	PANGALENGAN	13	56.338	1.093	122	127	9	136
50	KERTASARI	8	25.424	498	78	58	4	62
60	PACET	13	38.233	619	63	74	5	79
70	IBUN	12	29.511	403	9	55	4	59
80	PASEH	12	43.073	602	27	79	6	85
90	CIKANCUNG	9	30.775	382	61	57	4	61
100	CICALENGKA	12	40.573	562	126	75	5	80
101	NAGREG	8	18.822	398	129	53	4	57
110	RANCAEKEK	14	59.839	920	98	122	9	131
120	MAJALAYA	11	53.244	637	1	109	8	117
121	SOLOKANJERUK	7	31.050	400	23	58	4	62
130	CIPARAY	14	59.867	897	70	111	8	119
140	BALEENDAH	8	81.881	971	42	165	12	177
150	ARJASARI	11	36.088	642	44	73	5	78
160	BANJARAN	11	46.141	660	39	84	6	90
161	CANGKUANG	7	26.276	365	36	48	4	52
170	PAMEUNGPEUK	6	27.697	316	44	51	4	55
180	KATAPANG	7	41.189	493	6	75	5	80
190	SOREANG	10	39.163	563	19	72	5	77
191	KUTAWARINGIN	11	33.484	548	32	64	5	69
250	MARGAASIH	6	48.544	675	37	100	7	107
260	MARGAHAYU	5	38.036	455	19	79	6	85
270	DAYEUHKOLOK	6	35.921	442	4	73	5	78
280	BOJONGSOANG	6	33.892	589	78	77	6	83
290	CILEUNYI	6	53.669	771	32	106	8	114
300	CILENGKRANG	6	16.967	312	9	35	3	38
310	CIMENYAN	9	35.868	584	22	66	5	71
<b>JUMLAH</b>		<b>280</b>	<b>1.196.250</b>	<b>17.574</b>	<b>1.406</b>	<b>2.368</b>	<b>172</b>	<b>2.540</b>

Dalam pelaksanaan lapangannya, kegiatan besar Sensus Penduduk 2020 tentu tidak terlepas dari kendala. Bermula dari rekrutmen petugas dimana rentang waktu pelaksanaannya cukup singkat dikarenakan jadwal perekrutan petugas yang mundur seiring dengan pelaksanaan Sensus Penduduk yang mengalami penyesuaian jadwal akibat pandemi Covid-19. Namun hal ini bisa diatasi dengan koordinasi antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung beserta jajarannya sampai level desa. Sehingga pelaksanaan rekrutmen petugas Sensus Penduduk pun berjalan dengan lancar.

Sebelum pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk 2020, Petugas Sensus BPS Kabupaten Bandung sebanyak 2.541 orang mengikuti pelatihan online yang acaranya ditayangkan melalui kanal stasiun TVRI. Model pelatihan ini baru pertama kali dilaksanakan mengingat pandemi Covid-19 tengah melanda. Kekhawatiran muncul terkait pelatihan online dimana tidak ada yang dapat memastikan bahwa pembelajaran dapat diserap dengan maksimal. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala karena secara struktur petugas pencacah lapangan (PCS) diawasi oleh pengawas lapangan (PMS) sehingga apabila ada yang tidak mengerti dapat berkonsultasi kepada para pengawas lapangan dan pengawas lapangan pun dapat berkonsultasi kepada struktur di atasnya yaitu Koseka (Koordinator Sensus Kecamatan).

Pelatihan tersebut berjalan dengan lancar terlihat dari antusiasme dan semangat petugas untuk belajar mengenai tata cara pelaksanaan Sensus Penduduk supaya pelaksanaan lapangan berjalan dengan lancar.



**Gambar 13. Pelatihan Online Sensus Penduduk 2020 melalui siaran TVRI**

Pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk dilaksanakan pada tanggal 1 -15 September 2020. Untuk memastikan petugas dalam kondisi sehat (bebas Covid-19), BPS Kabupaten Bandung menyelenggarakan rapid tes supaya petugas dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada kekhawatiran karena petugas akan datang secara door to door ke rumah penduduk. Selain itu, petugas juga dilengkapi oleh Surat Tugas dan barcode yang bisa discan oleh masyarakat untuk menunjukkan bahwa petugas merupakan petugas resmi SP 2020.



**Gambar 14. Pelaksanaan Lapangan Kegiatan Sensus Penduduk 2020**

Para petugas juga dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) berupa *face shield* dan masker serta cairan “*Hand Sanitizer*” serta melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat ketika akan melaksanakan tugasnya ke lapangan. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat merespon dengan baik kedatangan petugas dan bersedia diwawancarai untuk turut serta berpartisipasi mensukseskan kegiatan Sensus Penduduk 2020.

Kegiatan lapangan Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Bandung mencakup dua tahap inti yaitu verifikasi Daftar Penduduk (DP) kepada Ketua RT setempat dan verifikasi ulang secara door to door ke rumah penduduk untuk memastikan kebenaran isian daftar penduduk. Pencacahan lapangan berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala. Diantaranya masih ditemukannya penduduk lewat cacah. Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan revisit (kunjungan ulang) untuk memastikan bahwa penduduk tersebut telah didata.

Kendala lainnya adalah waktu pelaksanaan lapangan yang relatif singkat sementara beban setiap petugas cukup banyak. Dengan manajemen waktu yang baik, petugas dapat menyelesaikan tugasnya dengan lancar. Selain itu, petugas juga menghadapi respon masyarakat yang kurang baik ketika didata. Dengan penjelasan yang mudah dipahami, masyarakat menjadi paham sehingga berkenan untuk didata. Secara keseluruhan, pelaksanaan Sensus Penduduk di Kabupaten Bandung berjalan dengan lancar dan sukses.

### **Pengolahan Sensus Penduduk 2020**

Salah satu tahapan untuk menghasilkan output Sensus Penduduk 2020 adalah pengolahan dokumen hasil pencacahan Sensus Penduduk yang telah dilaksanakan pada 1 – 15 September 2020. Pengolahan dokumen menjadi hal yang penting sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Kegiatan pengolahan dokumen Daftar Penduduk hasil Sensus Penduduk dilakukan di tingkat Kabupaten.

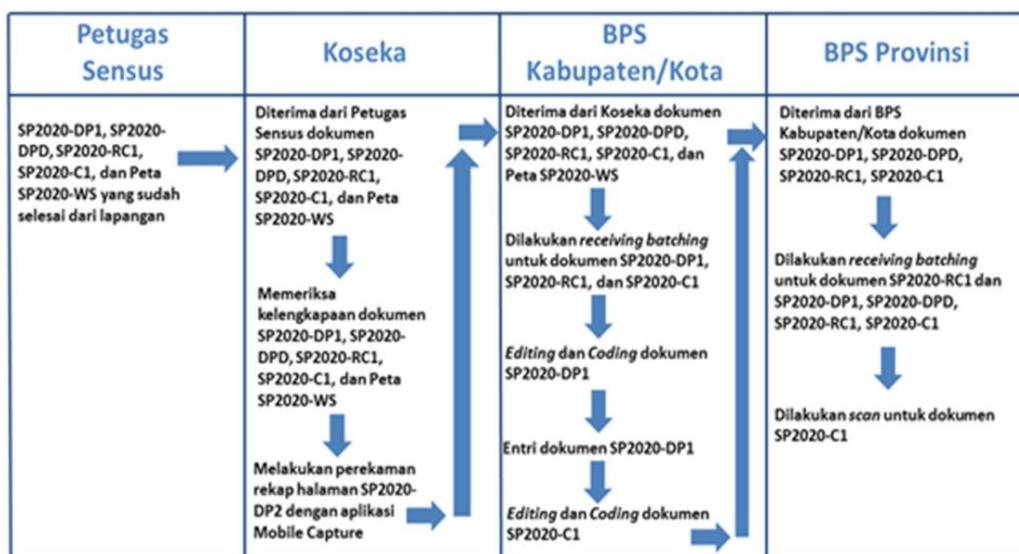
Jadwal pelaksanaan pengolahan data hasil Sensus Penduduk di Kabupaten Bandung adalah bulan November 2020. Dokumen SP2020-DP2 akan dientri dibawah koordinasi Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). Sistem dan program entri dikembangkan di BPS RI oleh Direktorat Sistem Informasi dan Statistik (SIS) yang dibantu oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai narasumber materi. Direktorat SIS juga bertanggung jawab mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan data SP2020-DP1 / SP2020-DP2 (baik data yang berasal dari Sensus Penduduk Online maupun data dari lapangan).

Pengolahan dokumen SP2020-DP1 / SP2020-DP2 dilakukan secara *online*. Pengolahan secara *online* dibutuhkan karena saat menambahkan keluarga atau individu baru dalam daftar SP2020- DP1 / SP2020-DP2, maka akan dilakukan pengecekan terhadap *database* seluruh Indonesia. Oleh karenanya, pengolahan Sensus Penduduk 2020, memerlukan perangkat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS RI. Hal ini dilakukan supaya dalam proses pengolahan data, perangkat mampu merekam data dengan baik dan cepat. Adapun spesifikasi sesuai dengan ketentuan BPS RI adalah sebagai berikut :

- Komputer Desktop atau Laptop
- Memiliki monitor minimal 12 inch, dengan minimum resolusi 1366 x 768
- Menggunakan Processor minimal *single core*
- Memori RAM minimal 2 GB
- Sistem Operasi : Windows 7/Windows 8/WIndows 10/LINUX/MAC/Chrome OS
- Software Aplikasi : Web Browser ( Chrome/Mozilla Firefox ) *ter-update*, tidak menggunakan moda penyamaran/*incognito/private browser*
- Kapasitas Hardisk minimal tersedia 32 GB (*free space*)
- Memiliki LAN / Wifi Card

Ada pun tahapan pengolahan dokumen SP2020-DP1 / SP2020-DP2 terdiri dari pengolahan data pra-komputer dan pengolahan data dengan komputer. Untuk pengolahan data pra-komputer terdiri dari penerimaan dokumen (*receiving*), pengelompokan dokumen (*batching*), dan penyuntingan/penyandian (*editing/coding*). Untuk pengolahan data dengan komputer terdiri dari perekaman rekam dokumen menggunakan aplikasi *Mobile Data Capture* (SP2020 MC), entri data SP2020-DP1 / SP2020-DP2, dan tabulasi data (*data tabulation*).

Alur dokumen dari Petugas Sensus, Koseka, BPS Kabupaten/Kota, dan BPS Provinsi dapat dilihat pada gambar 15.



Gambar 15. Alur Dokumen Sensus Penduduk 2020

Realisasi kegiatan pelaksanaan Pengolahan SP2020 berjalan cukup lancar, hanya saja penggunaan aplikasi sipmen.bps.go.id berjalan cukup lambat sehingga menghambat proses pengolahan. Dan beberapa kali link dpdigital.bps.go.id mengalami *maintenance* di siang hari sehingga menghambat proses pengolahan.



**Gambar 16. Kegiatan Pengolahan Sensus Penduduk 2020 BPS Kabupaten Bandung**

#### Pendataan Potensi Desa 2020

Pendataan Potensi Desa (PODES) merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi setingkat desa di seluruh Indonesia. Data hasil pendataan Potensi Desa (PODES) hingga saat ini merupakan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Data Podes dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh, data Podes digunakan untuk identifikasi tipologi wilayah misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-nonpesisir, tertinggal-nontertinggal, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk dapat dipenuhi.

Podes telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 10 tahun, sebagai bagian dari siklus 10 tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh BPS. Podes dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Pada tahun berakhiran '1', pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru.

Mendesaknya kebutuhan data Podes yang *ter-update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *Updating* data Podes. Data Podes yang *di-update* mencakup pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating PODES 2020*), yang dilaksanakan setiap tahun di luar tahun pendataan podes.

Pendataan *Updating Potensi Desa* semula direncanakan awal bulan Juni 2020, namun karena terkendala berbagai masalah termasuk masalah aplikasi, akhirnya dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 17 Juli 2020. Di Kabupaten Bandung terdapat 280 Desa/Kelurahan yang didata.

Pendataan desa/kelurahan menggunakan aplikasi *Updating PODES 2020*. Pendataan dilakukan melalui penelusuran dokumen dan wawancara dengan aparat pemerintah desa/kelurahan dan narasumber lain yang berwenang dan relevan. Aparatur pemerintahan desa/kelurahan adalah kepala desa/Lurah, sedangkan perangkat desa/kelurahan meliputi sekretaris desa/kelurahan dan kaur/kasi di desa/kelurahan.



**Gambar 17. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (PODES) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

Beberapa kendala dihadapi saat pendataan lapangan kegiatan Potensi Desa 2020. Kendala yang sangat sering dirasakan petugas adalah penggunaan aplikasi, mulai dari lamanya waktu sinkronisasi aplikasi sampai pada masalah data yang dikirim berstatus “pending”, padahal isian *clean* dan kondisi sinyal cukup bagus. Namun demikian, secara umum kegiatan lapangan Pendataan Potensi Desa (PODES) tahun 2020 di Kabupaten Bandung berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan / Ubinan

Sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk Kabupaten Bandung. Subsektor subsektor tersebut juga memainkan peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan asupan gizi masyarakat. Hal itu tercermin dari peran strategis komoditas beras sebagai sumber pangan utama (makanan pokok) masyarakat Indonesia.

Kondisi ini mengakibatkan dinamika harga beras sangat mempengaruhi inflasi sebagai salah satu variabel makro ekonomi yang sangat krusial dalam perekonomian nasional. Karena itu, tingkat ketersediaan beras dan juga komoditas pangan lainnya, dalam jumlah yang mencukupi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional, tapi juga stabilitas sosial dan politik.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini, khususnya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pemerintah melakukan berbagai cara melalui pelaksanaan program UPSUS (Upaya Khusus), seperti rehabilitasi jaringan irigasi teknis (JIT), optimasi lahan, perluasan areal tanam, dan sebagainya sebagai upaya pembangunan pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan pertanian ini membutuhkan dukungan data yang akurat sebagai pijakan perencanaan dan formulasi kebijakan sehingga dapat tepat sasaran.

Salah satu jenis data yang dibutuhkan adalah informasi mengenai luas panen tanaman pangan serta informasi luas baku lahan yang merupakan basis penghitungan angka produksi komoditas tersebut. Ketersediaan data statistik pangan yang berkualitas, obyektif dan akurat sangat diperlukan untuk dasar rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi agar segala kebijakan yang diambil pemerintah tidak salah

sasaran sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tujuan Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubina secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh Informasi mengenai Produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija)
2. Memperoleh Informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubina, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo, penggunaan pupuk, penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan lain-lain

Survei Tanaman Pangan mencakup sampel sebanyak 58 blok sensus yang tersebar di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Ditambah dengan pengumpulan data rutin melalui kegiatan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan yaitu SP Padi dan SP Palawija bulanan dari Dinas Pertanian dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Adapun Jenis-jenis Dokumen dan Frekwensi pengumpulan data Survei Statistik Tanaman Pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 20. Jenis Daftar, Frekuensi Pengumpulan dan Jadwal Pengumpulan Data Survei Statistik Tanaman Pangan**

No	Jenis Daftar	Frekuensi Pengumpulan	Jadwal Pelaporan
<b>Tanaman Pangan</b>			
1	SP-Padi	Bulanan	Tanggal 5 setelah bulan yang bersangkutan berakhir
2	SP-Palawija	Bulanan	Tanggal 5 setelah bulan yang bersangkutan berakhir
3	SP-Lahan	Tahunan	Tanggal 5 Januari
4	SP-Alsintan TP	Tahunan	Tanggal 5 Januari
5	SP-Benih TP	Tahunan	Tanggal 5 Januari
6	Daftar Sub-P SR I	Januari-April	2 minggu sebelum subround berjalan
7	Daftar Sub-P SR II	Mei-Agustus	2 minggu sebelum subround berjalan
8	Daftar Sub-P SR III	September-Desember	2 minggu sebelum subround berjalan
9	Daftar Sub-DS SR I	Januari-April	1 minggu sebelum subround berjalan

No	Jenis Daftar	Frekuensi Pengumpulan	Jadwal Pelaporan
10	Daftar Sub-DS SR II	Mei-Agustus	1 minggu sebelum subround berjalan
11	Daftar Sub-DS SR III	September-Desember	1 minggu sebelum subround berjalan
12	Daftar Sub-S SR I	Januari-April	Untuk bulan yang ada panen, dikirimkan bersama dengan waktu pengiriman Daftar SP-Padi dan SP-Palawija
13	Daftar Sub-S SR II	Mei-Agustus	
14	Daftar Sub-S SR III	September-Desember	

Adapun jumlah sampel Survei Statistik Tanaman Pangan tahun 2020 di Kabupaten Bandung untuk masing-masing jenis data survei yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 21. Jumlah Sampel Survei Statistik Tanaman Pangan Tahun 2020**

Kegiatan	Jumlah sampel
Subround I	23 Blok Sensus
Subround II	28 Blok Sensus
Subround III	23 Blok Sensus
Subround I	198 Plot
Subround II	175 Plot
Subround III	62 Plot
SP-PADI	31 Kecamatan
SP-PALAWIJA	31 Kecamatan
SP-BENIH	31 Kecamatan
SP-ALSINTAN	31 Kecamatan
SP-LAHAN	31 Kecamatan

Pelaksanaan kegiatan Survei Tanaman Pangan 2020 Kabupaten Bandung dilakukan oleh 62 orang petugas pencacah survey (pcs) yang terdiri dari 31 orang petugas BPS dan 31 orang petugas Dinas Pertanian dan 7 orang petugas pengawas/pemeriksa sampel (pms) yang berasal dari 3 orang dari BPS dan 4 orang Dinas Pertanian. Satu orang PCS melakukan pencacahan di satu kecamatan. Setiap PMS membawahi 8-10 orang PCS. Pelaksanaan lapangan dapat berjalan lancar dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelaksanaan pencacahan lapangan dan pengolahan hasil pencacahan lapangan seperti :

1. Pada saat melakukan Survei Tanaman Pangan terdapat kendala pada saat melakukan ubinan untuk mengukur produktivitas tanaman pangan dikarenakan alat ubinan yang ada terdapat 12 alat sehingga pada saat melakukan ubinan untuk dinas pertanian dilakukan bersama sama dengan BPS dikarenakan jumlah alat yang terbatas. Dengan dilakukannya ubinan secara bersama sama dengan dinas akan dapat menghasilkan angka hasil produktivitas yang lebih akurat lagi karena terpantau baik oleh Dinas dan BPS.
2. Perilaku responden yaitu rumahtangga tani yang akan melakukan panen terkadang tidak bisa sesuai dengan janji yang telah dibuat dengan petugas BPS atau Dinas dikarenakan hal tersebut tergantung pada keinginan responden sendiri, sehingga hal tersebut kadang menyulitkan petugas lapangan pada saat akan melakukan ubinan dikarenakan panennya sudah lewat (petugas tidak bisa melakukan ubinan). Untuk hal seperti ini petugas lapangan hanya bisa melakukan dengan metode wawancara untuk mendapatkan data yang diinginkan karena tidak dapat mengukur hasil produktivitas komoditas panen.
3. Belum dilakukannya pembinaan terhadap petugas lapangan secara rutin tiap tahun menyebabkan petugas lapangan khususnya yang berasal dari Dinas Pertanian tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ubinan (pengukuran produktivitas) sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan BPS. Apalagi saat ini banyak petugas lapangan yang dari Dinas Pertanian yang pensiun dan

digantikan dengan petugas yang baru dimana belum pernah mendapatkan pembinaan mengenai survey ini. Untuk mengatasi hal tersebut maka BPS meminta kepada petugas Dinas (KCD/PPL) untuk merapat ke KSK bila akan melakukan ubinan agar bisa mendapatkan pelajaran langsung bagaimana cara melakukan Survei Tanaman Pangan tersebut.

4. Pada tiap Subround mengalami keterlambatan pelaksanaan penarikan sampel karena mengalami kendala dalam hal penarikan sampel melalui BPS RI selain waktu listing/pemutakhiran yang sangat sangat terlambat karena penyelesaian lapangannyapun mengalami keterlambatan hampir 1 bulan berjalan mendekati subround tersebut selesai menunggu clean program dari pusat.



**Gambar 18. Kegiatan Lapangan Statistik Tanaman Pangan Tahun 2020**

## Pendataan Statistik Tanamana Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di dunia. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang kedua yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Di Indonesia, peranan sektor pertanian juga tidak kalah pentingnya karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah Indonesia juga sedang gencar melancarkan program-program yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian dalam upaya mendukung salah satu Nawacita yakni terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, tersedianya data pertanian yang tepat waktu dan akurat merupakan pondasi untuk dapat mewujudkan kebijakan pertanian yang tepat sasaran.

Selama ini, pengumpulan data luas panen baik padi maupun palawija masih menggunakan metode konvensional dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP). Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data luas panen masih didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Meskipun secara praktikal, metode tersebut mudah untuk diterapkan, tetapi penggunaan metode tersebut masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi dan waktu pengumpulan data yang cukup lama menjadi beberapa kekurangan dari penggunaan metode tersebut.

Dukungan untuk perbaikan data pertanian khususnya terkait metodologi pengumpulan data telah datang dari berbagai pihak, di antaranya dari Forum Masyarakat Statistik (FMS) Indonesia dan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan untuk hanya menggunakan satu data ke depannya dalam pengambilan kebijakan, yaitu data BPS. Data BPS menjadi acuan semua instansi di Indonesia. Sesuai dengan instruksi Presiden tersebut, maka satu data pangan bersumber dari BPS. Mengingat satu data pangan yang diperlukan untuk berbagai pengambilan kebijakan, BPS semakin dituntut untuk menyediakan data pangan yang akurat dan tepat waktu. Data pangan yang dihasilkan oleh BPS diharapkan dapat menggambarkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan system pelaporan yang berbasis teknologi dalam rangka memperbaiki metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk “Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)”.

Tujuan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data yang dahulu konvensional menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Pelaksanaan pengumpulan data statistik pertanian dengan menggunakan sistem KSA ini juga merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan uji coba sebelumnya yakni Uji Coba KSA di Pulau Jawa pada tahun 2017. Pelaksanaan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area di Kabupaten Bandung dilaksanakan setiap bulan.

**Tabel 22. Jadwal Kegiatan KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

No	Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
1	Persiapan	Desember 2019
2	Briefing Petugas di Kantor BPS Kabupaten Bandung	Januari 2020
3	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Januari	25-31 Januari 2020
4	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Februari	24-28 Februari 2020
5	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Maret	25-31 Maret 2020
6	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan April	24-30 April 2020
7	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Mei	24-31 Mei 2020
8	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Juni	25-30 Juni 2020
9	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Juli	25-31 Juli 2020
10	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Agustus	25-31 Agustus 2020
11	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan September	24-30 September 2020
12	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Oktober	25-31 Oktober 2020
13	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan November	24-30 November 2020
14	Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan bulan Desember	18-31 Desember 2020
15	Laporan Pelaksanaan kegiatan KSA Tahun 2020	30 Desember 2020 – 10 Januari 2020

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) adalah sebagai berikut : 1. Peta Lingkungan Sekitar; 2. Foto Lingkungan Sekitar; 3. Foto segmen dan titik pengamatan.; 4. Alat komunikasi HP berbasis android/perangkat android (milik pribadi); 5. Sistem Aplikasi Survei KSA; 6. Pedoman Pelaksanaan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA); 7. Pedoman Teknis Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode KSA di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh 25 petugas di mana 18 orang sebagai pcs dan 7 orang sebagai pms yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Petugas KSA 2020 pada Januari 2020. Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan fase tumbuh padi pada titik-titik pengamatan dalam sampel segmen. Secara umum, pelaksanaan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020 berjalan dengan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan.



**Gambar 19. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

## Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung selama tahun 2020 diantaranya adalah penghematan sumber daya dan penganggaran. BPS Kabupaten Bandung telah berupaya untuk melakukan penghematan sumberdaya energi listrik, dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar senantiasa melakukan pengecekan sebelum pulang kerja di masing-masing ruangan kerja, dengan cara mematikan AC (*Air Conditioner*), Monitor PC (*Personal Computer*), CPU (*Computer Processing Unit*), UPS (*Uninterrupted Power Supply*) komputer, Televisi dan lampu ruangan.

Upaya penghematan penggunaan Sumberdaya air dilakukan dengan cara : pemeriksaan kebocoran tanki, penggantian pipa instalasi air yang bocor dan kran-kran air secara berkala, penjadwalan pengisian tanki air, pemasangan pelampung pada tanki penampungan air dan himbauan bagi para pegawai menutup kran air pada saat yang bersangkutan akan keluar dari kamar mandi/toilet.

Penghematan biaya penggunaan telpon kantor, dilaksanakan dengan pemberitahuan dan himbauan kepada seluruh pegawai agar penggunaan telpon kantor hanya digunakan khusus untuk kepentingan dinas saja bukan keperluan pribadi. Hal ini tampaknya relatif berhasil dengan melihat adanya penurunan total pembayaran biaya langganan telpon dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir.

**Tabel 23. Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun BPS Kabupaten Bandung Tahun 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Biaya Langganan Telpon per Tahun (Rp.)	2.528.426,-	1.676.878,-	1.414.511,-	1.115.684,-

Upaya penghematan lainnya adalah penggunaan kembali kertas bekas pakai pada balik halaman yang masih kosong untuk melakukan pencetakan *draft* laporan, absensi manual, memo presensi, penempelan bon bukti belanja pada lampiran SPJ dan sebagainya.

Dari sisi penganggaran, dari Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 telah terjadi beberapa kali Revisi DIPA dalam rangka efisiensi/penghematan anggaran dan peningkatan efektivitas anggaran di BPS Kabupaten Bandung, yang dapat dilihat dari revisi perubahan PAGU Anggaran awal sampai dengan akhir.

Pada revisi DIPA ke-1 pada bulan Februari 2020 terjadi efisiensi/penghematan anggaran atau Pengurangan PAGU sekitar 4 milyar rupiah yang semula Rp.48.463.512.000,- menjadi Rp.44.769.506.000,- . Penghematan terbesar terjadi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan output Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Pada revisi DIPA ke-2 pada bulan April 2020 terjadi efisiensi/penghematan anggaran atau Pengurangan PAGU besar-besaran yang semula Rp.44.769.506.000,- menjadi Rp.8.630.251.000,- atau berkurang sekitar 80 persen. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran negara (APBN)/Refocusing anggaran untuk biaya penanganan pandemi Covid-19 yang baru melanda negara kita di awal tahun 2020.

Penghematan anggaran terbesar terjadi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dimana Pengurangan pagu total sebesar Rp.38.761.790.000,- dengan pagu semula sebesar Rp.38.761.790.000,- menjadi Rp.868.501.000,-. Penghematan terbesar ini diambil dari kegiatan Sensus Penduduk 2020 yang termasuk output Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Dengan berkurangnya pos anggaran Sensus Penduduk 2020 secara besar-besaran, maka kegiatan ini mengalami penyesuaian strategi /Proses Bisnis pelaksanaan SP2020.

Pada revisi DIPA ke-3 bulan September 2020, anggaran mengalami penambahan sebesar Rp.8.173.207.000,-. Penambahan ini terjadi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan output Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu adanya perubahan proses bisnis dan dasar hitung Sensus Penduduk 2020.

Pada revisi DIPA ke-4 awal bulan Nopember 2020, meskipun Pagu anggaran hanya mengalami sedikit penghematan untuk kegiatan VIMK sebesar Rp.3.046.000,-. Namun untuk meningkatkan efektifitas anggaran telah terjadi pergeseran anggaran untuk pengolahan SP2020 dan penambahan pagu belanja barang modal berupa Laptop, Printer dan Scanner senilai Rp. 195.388.000, yang diambil dari penyisihan sisa anggaran kegiatan Program pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) . Sedangkan pada Revisi DIPA terakhir hanya pergeseran untuk penyesuaian rincian POK.

**Tabel 24. Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2020**

Rev Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Kewenangan
01	5 Februari 2020	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat Perubahan sampel	48.463.512.000	44.769.506.000	DJA
02	29 April 2020	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Penghematan Anggaran	44.769.506.000	8.630.251.000	DJA

Rev Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu A Pagu Revisi (Rp.) <sup>wal</sup> (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Kewenangan
03	7 September 2020	Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Proses Bisnis SP2020	8.630.251.000	16.803.458.000	DJA
04	2 Nopember 2020	Revisi DIPA antar satker	16.803.458.000	16.800.412.000	DJA
05	27 Nopember 2020	Revisi Rincian POK	16.800.412.000	16.800.412.000	DJPB

Proses Revisi DIPA di BPS Kabupaten Bandung telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dengan total efisiensi/penghematan sebesar Rp. 31.663.100.000,-.

## Kinerja Anggaran Tahun 2020

Pagu yang diberikan kepada satker BPS Kabupaten Bandung untuk menjalankan fungsi pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp. 16.800.412.000,-.

Anggaran kegiatan 2020 tersebut diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Nasional BPS. Badan Pusat Statistik memiliki 4 (empat) program anggaran, namun pada satker BPS Kabupaten Bandung sendiri tahun anggaran 2020 ini hanya terdapat 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dibidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan Kapasitas SDM; (b) Penataan Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance; dan (c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Nilai Pagu anggaran pada tahun 2020 mengalami peningkatan Pagu Anggaran sebesar 23,48 persen atau bertambah sebesar Rp. 3.194.588. 000,-, jika dibandingkan dengan nilai pagu anggaran pada tahun 2019 (sebesar Rp. 13.605.824.000,-). Hal ini dapat dilihat pada tabel rincian perbandingan Pagu anggaran tahun 2019 dan 2020 menurut program di bawah ini.

Dibandingkan dengan tahun 2019, Kenaikan Pagu anggaran tahun 2020 yang terbesar terdapat pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yaitu naik Rp. 3.214.608.000 atau naik sebesar 41,15 %. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan Sensus Penduduk 2020 yang banyak melibatkan para petugas Mitra Statistik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.295.816. 000,-.

**Tabel 25. Perbandingan Pagu Anggaran  
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020**

Jenis Program	PAGU akhir Tahun 2019	PAGU akhir Tahun 2020	Selisih	% Kenaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.459.470.000	5.773.450.000	313.980.000	5,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	334.000.000	0	-334.000.000	(100,00)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	7.812.354.000	11.026.962.000	3.214.608.000	41,15
<b>Jumlah</b>	<b>13.605.824.000</b>	<b>16.800.412.000</b>	<b>3.194.588.000</b>	<b>23,48</b>

Pada tahun ini, tidak terdapat pagu anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) seperti tahun sebelumnya dimana ada belanja Pengadaan Mobil Kendaraan Dinas dan Biaya Pemasangan meteran Listrik PLN. Sementara itu, pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) anggaran tahun 2020 naik sebesar Rp. 313.980.000,- atau sebesar 6 %.

Berdasarkan Tingkat Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2020 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan adalah sebesar 94,65 persen dari total pagu tersedia. Rincian realisasi daya serap anggaran menurut program, masing masing adalah sebagai berikut : 90,58 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dan 96,78 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Penyerapan program pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dibandingkan dengan penyerapan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2020 Menurut Program**

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Sisa (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.773.450.000	5.229.456.103	90,58	543.993.897	9,42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	0	0	0	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	11.026.962.000	10.672.433.716	96,78	354.528.284	3,22
<b>Total</b>	<b>16.800.412.000</b>	<b>15.901.889.819</b>	<b>94,65</b>	<b>898.522.181</b>	<b>5,35</b>

Jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya telah terjadi penurunan daya serap anggaran sebesar 3,09 persen. Capaian kinerja anggaran berdasarkan persentase daya serap anggaran total pada tahun 2020 sebesar 94,65 persen.

Adapun penurunan daya serap anggaran terbesar pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dengan penurunan nilai sebesar 8,04 persen. Begitu pula daya serap Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) mengalami sedikit penurunan persentase daya serap, sebesar 0,87 persen.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2019-2020 Menurut Program

Program	Tahun 2019			Tahun 2020			Selisih Realisasi (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.459.470.000	5.384.089.774	98,62	5.773.450.000	5.229.456.103	90,58	(8,04)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	334.000.000	332.563.000	99,57	0	0	-	-
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	7.812.354.000	7.630.434.548	97,67	11.026.962.000	10.672.433.716	96,78	(0,87)
<b>Total</b>	<b>13.605.824.000</b>	<b>13.347.087.322</b>	<b>97,68</b>	<b>16.800.412.000</b>	<b>15.901.889.819</b>	<b>94,65</b>	<b>(3,09)</b>

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2019-2020 Menurut Output Program DMPTTL Tahun 2020

No	Output	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020			Selisih % realisasi 2019-2020
			Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi	
1	2886-970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	38.755.000	27.873.750	71,92	15.575.000	13.720.800	88,10	16,17
2	2886-994	001.A. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai (non UM,UL,TK)	2.277.846.000	2.275.996.387	99,92	2.363.571.000	2.262.409.492	95,72	(4,20)
3	2886-994	001.A.511129 Belanja Uang Makan PNS	193.878.000	176.934.000	91,26	306.803.000	227.824.000	74,26	(17,00)
4	2886-994	001.A.512211 Belanja Uang Lembur	-	-	-	50.000.000	21.984.000	43,97	43,97
5	2886-994	001.A.512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.329.232.000	2.322.743.356	99,72	2.233.547.000	1.937.048.376	86,73	(13,00)
6	2886-994	002. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	619.759.000	580.542.281	93,67	803.954.000	766.469.435	95,34	1,67
Total			5.459.470.000	5.384.089.774	98,62	5.773.450.000	5.229.456.103	90,58	(8,04)

Penurunan daya serap anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) tahun 2020 lebih banyak disebabkan oleh penurunan daya serap anggaran belanja pegawai karena terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan pindah satker dan adanya kebijakan tidak boleh dicairkannya pagu tunjangan kinerja bulan ke-13 dan 14.

Perbandingan tingkat penyerapan anggaran terhadap Pagu masing-masing jenis belanja menurut jenis belanja pada tahun 2020, persentase daya serap anggaran tertinggi terdapat pada belanja modal sebesar 96,65 persen, disusul dengan belanja barang sebesar 96,60 persen dan nilai daya serap paling rendah pada jenis belanja pegawai sebesar 89,80 persen. Anggaran Belanja modal ini muncul pada triwulan ke-4 karena adanya kebijakan penghematan/efisiensi anggaran pada Sisa Anggaran Belanja Barang yang kemungkinan tidak akan terserap dialihkan menjadi Belanja Modal.

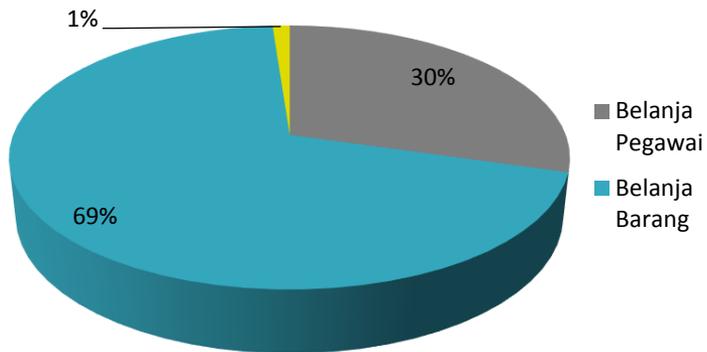
**Tabel 29. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2020 Menurut Jenis Belanja**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Sisa (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51. Belanja Pegawai	4.953.921.000	4.448.743.164	89,80	505.177.836	10,20
52. Belanja Barang	11.651.103.000	11.254.428.951	96,60	396.674.049	3,40
53. Belanja Modal	195.388.000	188.850.000	96,65	6.538.000	3,35
<b>Total</b>	<b>16.800.412.000</b>	<b>15.892.022.115</b>	<b>94,59</b>	<b>258.736.678</b>	<b>5,41</b>

Berdasarkan komposisi alokasi pagu anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2020 per jenis belanja, pagu anggaran tertinggi terdapat pada anggaran belanja barang sebesar 69 persen dan pagu anggaran terendah pada pagu anggaran belanja modal sebesar 1 persen. Sedangkan pagu anggaran belanja pegawai mencapai 30 persen.

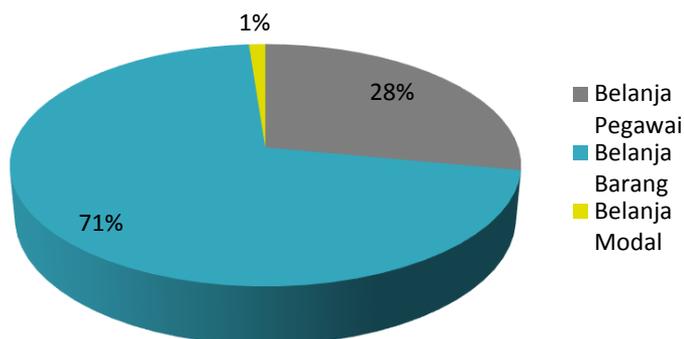
Seperti halnya pada komposisi pagu anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2020, komposisi realisasi belanja tertinggi terdapat pada anggaran belanja barang sebesar 71

persen dan realisasi belanja anggaran terendah pada realisasi anggaran belanja modal sebesar 1 persen. Sedangkan pagu anggaran belanja pegawai mencapai 28 persen.



**Gambar 20. Komposisi Alokasi Anggaran menurut Jenis Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

Jika melihat jumlah komposisi anggaran belanja modal dan belanja barang BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebesar 72 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai sebesar 28 persen. Tingginya persentase belanja modal dan belanja barang ini diharapkan dapat mendorong peningkatan laju perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Bandung sesuai dengan tujuan Program Pemerintah Pusat.



**Gambar 21. Komposisi Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2020, dihitung dengan membandingkan antara Realisasi penyerapan anggaran menurut Output, dengan capaian kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja dapat dilihat pada tabel 30.

Tingkat efisiensi anggaran tertinggi dicapai oleh tujuan strategis pertama yaitu "Penyediaan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan" dengan nilai efisiensi sebesar 23,21 persen. Hal ini dapat dilihat dari selisih capaian dimana persentase capaian kinerja yang dicapai oleh tujuan strategis tersebut di tahun 2020 sebesar 120 persen sedangkan capaian realisasi anggarannya hanya sebesar 96,79 persen. Selanjutnya nilai efisiensi kedua tertinggi dicapai oleh tujuan strategis keempat "Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi" sebesar 22,62 persen. Urutan tingkat efisiensi berikutnya yaitu dicapai oleh tujuan ketiga " Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) dengan nilai efisiensi sebesar 11,54 persen. Sedangkan tingkat efisiensi terendah dicapai oleh tujuan

kedua yaitu “ Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN” sebesar 7,69 persen.

Berdasarkan tabel 30, rata-rata tingkat efisiensi anggaran berdasarkan tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran terhadap realisasi anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2020 mencapai nilai sebesar 13,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BPS Kabupaten Bandung dapat menggunakan anggaran secara efektif dan berhasil melakukan efisiensi penganggaran dalam mencapai target kinerja tahun 2020 sesuai tujuan dari sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

**Tabel 30. Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

Tujuan	Sasaran	% Capaian Kinerja	Kode dan Uraian Jenis Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Efisiensi (Selisih Capkin-Realisasi Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan	1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik	120,00	054.01.06. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	10.988.492.000	10.636.227.816	96,79	23,21
			(1) 054.01.06.2899.007	22.610.000	22.125.900		
			(2) 054.01.06.2899.006	7.677.000	7.061.000		
			(3) 054.01.06.2900.005	89.400.000	89.300.000		
			(4) 054.01.06.2902.004	1.430.000	1.407.000		
			(5) 054.01.06.2902.005	30.472.000	30.297.500		
			(6) 054.01.06.2902.006	850.000	680.000		
			(7) 054.01.06.2903.009	58.989.000	47.572.000		
			(8) 054.01.06.2903.012	6.145.000	5.805.000		
			(9) 054.01.06.2904.006	218.709.000	182.201.400		
			(10) 054.01.06.2904.006	67.225.000	64.800.000		
			(11) 054.01.06.2905.005	162.424.000	160.934.500		
			(12) 054.01.06.2905.005	32.460.000	32.000.000		
			(13) 054.01.06.2905.006	9.295.816.000	9.050.585.351		
			(14) 054.01.06.2906.003	453.967.000	443.812.000		

Tujuan	Sasaran	% Capaian Kinerja	Kode dan Uraian Jenis Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Efisiensi (Selisih Capkin-Realisasi Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan	1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik	120,00	054.01.06. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	10.988.492.000	10.636.227.816	96,79	23,21
			(15) 054.01.06.2906.003	33.303.000	32.400.000		
			(16) 054.01.06.2907.006	8.640.000	7.806.250		
			(17) 054.01.06.2907.008	42.029.000	41.335.004		
			(18) 054.01.06.2907.008	9.200.000	8.900.000		
			(19) 054.01.06.2908.004	47.170.000	43.896.900		
			(20) 054.01.06.2908.005	6.538.000	5.309.900		
			(21) 054.01.06.2909.005	4.842.000	3.844.500		
			(22) 054.01.06.2910.007	81.712.000	53.984.511		
			(23) 054.01.06.2910.007	44.200.000	43.200.000		
			(24) 054.01.06.2910.008	11.692.000	10.395.500		
			(25) 054.01.06.2910.008	7.000.000	5.800.000		
			(26) 054.01.06.2910.010	264.602.000	261.149.500		
			(27) 054.01.06.2910.010	2.000.000	1.750.000		

Tujuan	Sasaran	% Capaian Kinerja	Kode dan Uraian Jenis Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Efisiensi (Selisih Capkin-Realisasi Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100,00	054.01.06.2897.003 Program PPIS- Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik - SISTEM METADATA YANG DIKEMBANGKAN	1.300.000	1.200.000	92,31	7,69
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	100,00	054.01.06.2897.004 Program PPIS-Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik - SISTEM PENDUKUNG LAYANAN UNTUK DISEMINASI DATA DAN INFORMASI STATISTIK YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPELIHARA	14.560.000	12.880.000	88,46	11,54
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	113,20	054.01.01.2886. Program DMP TTL-Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	5.773.450.000	5.229.456.103	90,58	22,62
Nilai Rata-Rata % Capaian Tujuan		108,30	Nilai % Realisasi Anggaran			94,65	13,65

Keterangan :

Kode	Uraian Jenis Program/Kegiatan/Output
(1) 054.01.06.2899.007	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN NASIONAL DAN REGIONAL YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(2) 054.01.06.2899.006	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi - PUBLIKASI/ LAPORAN NERACA PRODUKSI

Kode	Uraian Jenis Program
(3) 054.01.06.2900.005	Program PPIS-Kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI
(3) 054.01.06.2900.005	Program PPIS-Kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI
(4) 054.01.06.2902.004	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI YANG TERBIT TEPAT WAKTU
(5) 054.01.06.2902.005	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi - PUBLIKASI/LAPORAN PENYUSUNAN STATISTIK PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH KOMODITI TERTENTU
(6) 054.01.06.2902.006	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi - PUBLIKASI/LAPORAN UPDATING DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN
(7) 054.01.06.2903.009	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA
(8) 054.01.06.2903.012	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA KONSTRUKSI (Belanja Barang)
(9) 054.01.06.2904.006	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI (Belanja Barang)
(10) 054.01.06.2904.006	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI (Belanja Modal)
(11) 054.01.06.2905.005	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN (Belanja Barang)
(12) 054.01.06.2905.005	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN (Belanja Modal)
(13) 054.01.06.2905.006	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan - PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK (Belanja Barang)
(14) 054.01.06.2906.003	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERBIT TEPAT WAKTU (Belanja Barang)
(15) 054.01.06.2906.003	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERBIT TEPAT WAKTU (Belanja Modal)

Kode	Uraian Jenis Program
054.01.06.2907.006	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL (Belanja Barang)
054.01.06.2907.008	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial - PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODE (Belanja Barang)
054.01.06.2907.008	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial - PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODE (Belanja Modal)
054.01.06.2908.004	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA YANG TERBIT TEPAT WAKTU (Belanja Barang)
054.01.06.2908.005	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Belanja Barang)
054.01.06.2909.005	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU (Belanja Barang)
054.01.06.2910.007	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN (Belanja Barang)
054.01.06.2910.007	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN (Belanja Modal)
054.01.06.2910.008	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan -PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (Belanja Barang)
054.01.06.2910.008	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (Belanja Modal)
054.01.06.2910.010	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA (Belanja Barang)
054.01.06.2910.010	Program PPIS-Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA (Belanja Modal)

Pada tahun 2018 kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), telah mulai melakukan Penilaian Kinerja dalam pelaksanaan anggaran seluruh satker Kementerian dan Lembaga pemerintah Pusat setiap bulan terkait dengan kepatuhan terhadap jadwal dan ketertiban pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku, melalui penilaian 13 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA), yang terdiri dari :

1. Pengajuan UP dan TUP (Kesesuaian Nilai dan jadwal penggunaan UP/TUP)
2. Data Kontrak (Ketertiban pengajuan Data Kontrak LS pihak ketiga)
3. Kesalahan SPM (Banyak tingkat kesalahan dalam pengajuan SPM)
4. Retur SP2D (Tingkat penolakan dan Pengembalian SP2D)
5. Halaman III DIPA (Kesesuaian Rencana Penarikan Dana dengan realisasi)
6. Revisi DIPA (Jumlah Revisi DIPA yang dilakukan dalam setahun)
7. Penyelesaian Tagihan (Ketertiban dan kepatuhan jadwal penyelesaian tagihan)
8. Rekon LPJ (Ketertiban dan kepatuhan Rekon dan pelaporan LPJ sesuai jadwal)
9. Renkas (Kesesuaian Rencana Kas)
10. Pagu Minus (Penyelesaian PAGU Minus)
11. Realisasi (Besaran realisasi penyerapan anggaran)
12. Dispensasi SPM (Tingkat Penggunaan Dispensasi SPM)
13. Konfirmasi Capaian Output

Pada penilaian IKPA satker tahun 2020 terdapat perbedaan dengan penilaian tahun 2019, dengan penambahan penilaian 1 (satu) indikator yaitu indikator Konfirmasi Capaian Output dan untuk Indikator Renkas tahun ini masih tetap belum masuk dalam perhitungan bobot penilaian. Hal lain yang agak berbeda dalam proses penilaian IKPA pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 adalah terjadinya perubahan bobot penilaian yang pada indikator-indikator pelaksanaan anggaran yang dinilai, dengan rincian pada tabel 27 berikut.

**Tabel 31. Perubahan Bobot Penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2020 dan Tahun 2019**

No	Jenis Penilaian	Bobot (%) Tahun 2020	Bobot (%) Tahun 2019	Selisih Bobot (%)
1	Pengelolaan UP	8	10	-2
2	Data Kontrak	15	15	0
3	Kesalahan SPM	5	6	-1
4	Retur SP2D	5	6	-1
5	Hal III DIPA	5	5	0
6	Revisi DIPA	5	5	0
7	Penyelesaian Tagihan	12	15	-3
8	Rekon LPJ	5	5	0
9	Renkas	0	0	0
10	Realisasi	15	20	-5
11	Pagu Minus	5	4	1
12	Dispensasi SPM	5	4	1
13	Konfirmasi Capaian Output	10	0	10
<b>Konversi Bobot (%)</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>

Hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh satker dilakukan secara rutin dengan perhitungan kumulatif setiap bulan. Hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh setiap satuan kerja yang dapat diakses melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN pada alamat website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Hasil pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) tahun 2020 yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terhadap satker BPS Kabupaten Bandung, sebagaimana yang terlihat pada tabel 28 diperoleh Nilai akhir masing-masing indikator IKPA sebagai berikut : Pengelolaan UP/TUP 7,6 ; Penyelesaian Data Kontrak 10,05 ; Kesalahan SPM 4,25; Retur SP2D 5 ; RPD Hal III DIPA 2,97; Revisi DIPA 5; Penyelesaian Tagihan 8; Realisasi 10,64; Pagu Minus 5; LPJ Bendahara 5 ;

Dispensasi SPM 5 dan Konfirmasi Capaian Output 10, dengan Jumlah Nilai akhir IKPA sebesar 82,64 .

**Tabel 32. Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Pengelolaan UP</b>	95,00	8	7,60
2	<b>Data Kontrak</b>	67,00	15	10,05
3	<b>Kesalahan SPM</b>	85,00	5	4,25
4	<b>Retur SP2D</b>	100,00	5	5,00
5	<b>Deviasi Hal III DIPA</b>	59,34	5	2,97
6	<b>Revisi DIPA</b>	100,00	5	5,00
7	<b>Penyelesaian Tagihan</b>	66,67	12	8,00
8	<b>Rekon LPJ</b>	100,00	5	5,00
9	<b>Renkas</b>	0,00	0	0,00
10	<b>Realisasi</b>	70,94	15	10,64
11	<b>Pagu Minus</b>	100,00	5	5,00
12	<b>Dispensasi SPM</b>	100,00	5	5,00
13	<b>Konfirmasi Capaian Output</b>	100,00	10	10,00
<b>Nilai Total</b>				<b>78,51</b>
<b>Konversi Bobot</b>				<b>95%</b>
<b>Nilai Akhir</b> (Nilai Total/Konversi Bobot)				<b>82,64</b>

Hasil penilaian IKPA tahun 2020 pada 6 (enam) indikator, yaitu : **Retur SP2D, Revisi DIPA, Rekon LPJ, Pagu Minus, Dispensasi SPM dan Konfirmasi Capaian Output** telah mencapai nilai sesuai nilai maksimal bobot penilaian masing-masing indikator TA 2020.

Tabel 29 memperlihatkan perbandingan hasil penilaian IKPA tahun 2019 dengan hasil penilaian IKPA 2020 . Hal yang cukup menggembirakan adalah terjadinya peningkatan nilai pada 4 (empat) indikator IKPA, yaitu : Data Kontrak (naik 0,6 poin), Pagu Minus (naik 1,00 poin), Dispensasi (naik 1 poin) dan Konfirmasi Capaian Output (naik 10,00 poin). Namun pada indikator lainnya terjadi juga penurunan hasil penilaian IKPA

pada 6 (enam) indikator, yaitu : Pengelolaan UP ( turun 2,4 poin), Kesalahan SPM (turun 0,85 poin), Retur SP2D (turun 1,00 poin), Deviasi Halaman III (turun 1,76 poin), Penyelesaian tagihan (turun 7,00 poin) dan Realisasi anggaran (turun 9,36 poin). Sedangkan untuk Indikator LPJ dan Revisi DIPA nilai IKPA relatif tetap.

Hasil penilaian IKPA tahun 2019 dan hasil penilaian IKPA 2020 sebelum bobot tertimbang masing-masing sebesar 88,28 dan 78,51, sehingga terjadi penurunan sebesar 9,77 poin dan setelah adanya bobot tertimbang nilai hasil akhir tahun 2020 menjadi sebesar 82,64 atau turun sebesar 10,29 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 33. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020**

No	Jenis Penilaian	2020 Nilai	2020		2019		Selisih Nilai Akhir	
			Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	Bobot (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengelolaan UP	95,00	8	7,60	100,00	10	10,00	(2,40)
2	Data Kontrak	67,00	15	10,05	63,00	15	9,45	0,60
3	Kesalahan SPM	85,00	5	4,25	85,00	6	5,10	(0,85)
4	Retur SP2D	100,00	5	5,00	100,00	6	6,00	(1,00)
5	Hal III DIPA	59,34	5	2,97	94,61	5	4,73	(1,76)
6	Revisi DIPA	100,00	5	5,00	100,00	5	5,00	-
7	Penyelesaian Tagihan	66,67	12	8,00	100,00	15	15,00	(7,00)
8	Rekon LPJ	100,00	5	5,00	100,00	5	5,00	-
9	Renkas	-	-	-	-	-	-	-
10	Realisasi	70,94	15	10,64	100,00	20	20,00	(9,36)
11	Pagu Minus	100,00	5	5,00	100,00	4	4,00	1,00
12	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00	100,00	4	4,00	1,00
13	Konfirmasi Capaian Output	100,00	10	10,00	-	-	-	10,00
<b>Nilai Total</b>				<b>78,51</b>			<b>88,28</b>	
<b>Konversi Bobot (%)</b>				<b>95</b>			<b>95</b>	
<b>Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)</b>				<b>82,64</b>			<b>92,93</b>	

Terjadinya penurunan point nilai akhir indikator tahun 2020 pada umumnya disebabkan karena adanya perubahan/penurunan bobot penilaian indikator. Namun demikian untuk penurunan nilai pada beberapa indikator seperti Pengelolaan UP, Deviasi Hal III DIPA, Penyelesaian Tagihan dan Realisasi Anggaran perlu perhatian lebih lagi dalam pengelolaannya, agar hasil penilaian IKPA pada tahun berikutnya dapat lebih ditingkatkan lagi menuju angka bobot maksimal indikator yang bersangkutan.

Secara umum hasil penilaian akhir penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung sudah di atas 80,00 persen, menunjukkan bahwa satker BPS Kabupaten Bandung sudah termasuk dalam kategori penilaian satker yang telah melaksanakan anggaran dengan relatif baik, meskipun pada beberapa indikator penilaian IKPA yang masih dibawah nilai 80,00 sehingga masih perlu lebih ditingkatkan lagi kinerja pengelolaannya.

## Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh Tahun 2020

Pada tahun 2020 satker BPS Kabupaten Bandung telah memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi kinerja baik para pegawai BPS Kabupaten Bandung dalam penyelesaian tugas dan fungsinya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dengan rincian Piagam penghargaan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 milyar rupiah***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2020
2. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Milyar Rupiah***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2020
3. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Bidang Statistik Sosial Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Milyar Rupiah***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2020

## PENUTUP

### Tinjauan Umum

BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mempunyai 4 (empat) tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) Penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan (2) Peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, (3) Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, dan (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Masing-masing tujuan tersebut terbagi ke dalam beberapa sasaran strategis yang lebih rinci.

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung tahun 2020 relatif telah dapat tercapai dengan baik, yang dicerminkan oleh nilai capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang relatif tinggi, dengan nilai capaian secara rata-rata telah melebihi antara 3 persen sampai dengan 20 persen diatas target akhir renstra.

Perkembangan capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, mengalami trend atau kecenderungan kenaikan yang positif, namun demikian BPS Kabupaten Bandung harus senantiasa berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, terutama upaya peningkatan pada indikator-indikator sasaran yang masih memiliki nilai capaian belum penuh .

Perbandingan antara capaian kinerja tujuan/sasaran dengan penyerapan anggaran tahun 2020, diperoleh rata-rata persentase Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran, dengan rata-rata efisiensi anggaran tujuan/sasaran sebesar 13,65 persen. Hal ini berarti tujuan efektifitas dan efisiensi sistem penganggaran berbasis kinerja telah dapat tercapai dengan baik.

## Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah :

- (1) Perlu usaha yang lebih keras lagi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tujuan keempat, yaitu “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi” , khususnya pada sasaran “SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan” dengan indikator sasaran “Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS” dengan memperbaiki sistem kerja dan melengkapi arsip dokumentasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan point penilaian SAKIP.
- (2) Perlu usaha pendekatan dan sosialisasi yang lebih lagi dalam rangka meningkatkan *respon rate*, khususnya untuk responden rumah tangga dan responden usaha untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator “Persentase pemasukan dokumen dengan pendekatan rumah tangga dan usaha”.
- (3) Melakukan *review*/peninjauan nilai target pada indikator sasaran, yaitu “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS” dengan mempertimbangkan hasil evaluasi nilai realisasi pada tahun 2020 dengan tetap mempertimbangkan Target Renstra berikutnya.
- (4) Melakukan penajaman (peningkatan) target kinerja pada beberapa indikator sasaran yang telah memiliki capaian kinerja jauh di atas 100 persen. Penajaman target kinerja ini disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi nilai realisasi pada tahun 2020 dengan tetap mempertimbangkan Target Renstra berikutnya. Usaha penajaman (peningkatan) target kinerja diharapkan akan menjadi pendorong bagi para pegawai BPS Kabupaten Bandung untuk dapat berkinerja jauh lebih baik lagi.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran 1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2020-2024

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas					
Indikator :					
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	75%	78%	80%	83%	85%
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN					
Indikator :					
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	3,1	3,1	3,5	4,0	5,0
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
SS.3. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I					
Indikator :					
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	10	12	15	18	20

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T.4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi					
SS.3. SDM Statistik Yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan					
Indikator :					
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	61,2	61,3	61,4	61,5	61,6

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hartadi, S.ST, M.E.  
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Bandung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Dody Herlando, M.Econ.  
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

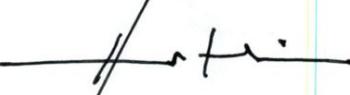
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 31 Maret 2020

**Pihak Kedua**

  
**(Ir. Dody Herlando, M.Econ.)**  
NIP. 19640726 198601 1 001

**Pihak Pertama**

  
**(Agung Hartadi, S.ST, M.E.)**  
NIP. 19750909 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BPS KABUPATEN BANDUNG.**

<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	0
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	35
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei	Persen	89,82
	- Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	94,50
	- Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	Persen	81,81
- Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	93,02	
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	90
2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	20.000

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	90
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	90
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadana kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadana	6
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumber daya manusia BPS	Jumlah metadana kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadana	6
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	61
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	61
	Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	-
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	0

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	Rp. 5.838.380.000,-
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 38.931.126.000,-

Bandung, 31 Maret 2020

Pihak Kedua

**(Ir. Dody Herlando, M.Econ.)**  
NIP. 19640726 198601 1 001

Pihak Pertama

**(Agung Hartadi, S.ST, M.E.)**  
NIP. 19750909 199403 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
(REVIEW)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hartadi, S.ST, M.E.  
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Bandung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dyah Anugrah Kuswardani MA  
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 30 November 2020

**Pihak Kedua**

**(Dyah Anugrah Kuswardani MA)**  
NIP. 19620314 198501 2 001

**Pihak Pertama**

**(Agung Hartadi, S.ST, M.E.)**  
NIP. 19750909 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG  
(REVIEW)**

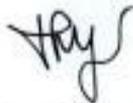
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(a)	(b)	(c)	(d)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	10,8
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	6
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	6
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	30
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	10
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	61,2
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	61,2

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	75

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	Rp. 5.773.450.000,-
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 11.026.962.000,-

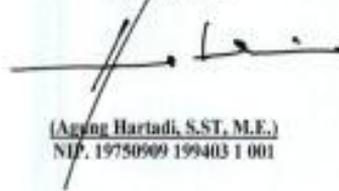
Bandung, 30 November 2020

Pihak Kedua



(Dyah Anugrah Kuswardani MA)  
NIP. 19620314 198501 2 001

Pihak Pertama



(Agung Hartadi, S.ST, M.E.)  
NIP. 19750909 199403 1 001

Lampiran 4. Rincian SDM ASN BPS Kabupaten Bandung akhir 2020

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan						Total
		SMP	SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>Staf dan Struktural</b>							
1	Kepala BPS Kabupaten					1		<b>1</b>
2	Subbag Tata Usaha		2	1	2			<b>5</b>
3	Seksi Statistik Sosial				3			<b>3</b>
4	Seksi Statistik Produksi		1			2		<b>3</b>
5	Seksi Statistik Distribusi				1	1		<b>2</b>
6	Seksi Nerwilis				1	1		<b>2</b>
7	Seksi IPDS			1	1	1		<b>3</b>
<b>Sub Jumlah A</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>B</b>	<b>Petugas Lapangan</b>							
1	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK )		4	1	10			<b>15</b>
<b>Sub Jumlah B</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

### Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2020

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Statistik Sosial</b>													
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	√						√					
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran		√						√				
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan							√					
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan								√				
6	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020		√										
7	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020			√									
8	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020								√				
9	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020									√			
10	Survei Statistik Polkam			√	√	√	√						
11	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020		√	√									
12	Pendataan Potensi Desa (PODES2020- Desa)					√							

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Pendataan Potensi Desa (PODES2020-Kecamatan)					√							
14	Pendataan Potensi Desa (PODES2020-Kabupaten)					√							
15	Sensus Penduduk 2020									√			
Statistik Produksi													
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)		√	√	√	√	√	√					
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Tahunan		√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Listing							√					
5	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan								√				
6	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Listing			√									
7	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	√			√			√			√		
8	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)	√			√			√			√		
10	Survei Peternakan Tahunan (LTS)			√	√	√	√						
11	Survei Peternakan Tahunan (LTT)			√	√	√	√						

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Survei Peternakan Tahunan (LTU)			√	√	√	√						
13	Survei Tanaman Pangan/Ubina Listing				√				√				√
14	Survei Tanaman Pangan/Ubina Pencacahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Survei Hortikultura			√	√	√	√						
16	Survei Konstruksi Triwulanan				√			√			√		√
17	Survei Konstruksi Tahunan		√	√	√	√	√	√	√	√	√		
18	Survei SP-Lahan	√											
19	Survei SP- Benih	√											
20	Survei SP- Alsin	√											
21	Survei SP Padi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	Survei SP Palawija	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Survei SPH-Lahan	√											
24	Survei SPH- SBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25	Survei SPH-BST				√			√			√		√
26	Survei SPH-TH				√			√			√		√
27	Survei SPH-TBF				√			√			√		√
28	Survei SPH-Benih	√											
29	Survei LITBANG							√	√	√			
30	Survei Kostruksi Tahunan		√	√	√	√	√						
31	Survei Kostruksi TRIWULANAN	√			√			√			√		
32	Updating Direktori Konstruksi			√	√								
33	Survei Captive Power		√	√	√	√	√	√	√				
34	Survei Penggalian Berbadan Hukum		√	√	√	√	√	√	√				
35	Survei Penggalian Usaha Ruamahtangga		√	√	√	√	√	√	√				

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(URT)												
36	Survei Energi Listrik		√	√	√	√	√	√	√				
<b>Statistik Distribusi</b>													
1	HPB / Harga Perdagangan Besar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	HPB (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)					√	√						√
3	IKK /Indeks Kemahalan Konstruksi	√			√			√			√		
4	SHPed /Harga Produsen Pedesaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	SHPed /Harga Konsumen Pedesaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	HPG /Monitoring Harga Produsen Gabah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	HPBG /Harga Beras di Penggilingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	HP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	HPJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	HPT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	HP (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)					√	√						√
12	Survei Keuangan TK II - APBD 2				√	√	√						
13	Survei Keuangan TK II - K2				√	√	√						
14	Survei Keuangan TK Desa - K3				√	√	√	√					
15	Survei Lembaga Keuangan								√	√	√		
16	VHT-L / Survei Hotel Tahunan							√	√	√	√		
17	VHT-S / Survei Tingkat Penghunian Kamar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18	PJ II-5		√	√	√								
19	AJR II-2		√	√	√								
20	AJR II-3		√	√	√								
21	STKU / Survei Triwulanan Kegiatan	√			√			√			√		

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Usaha												
22	Survei Penyusunan Direktori Pasar & Pusat Perdagangan				√								
23	Survei Peningkatan Kualitas Data Ekspor				√	√							
24	PAW / Survei Perdagangan Antar Wilayah				√	√	√						
25	VREST/ Survei Usaha Restoran				√	√	√						
26	VDTW/ Survei Daya Tarik Wisata				√	√	√						
27	SHPI/Survei Harga Perdagangan Internasional					√	√	√					
28	Poldis / Survei Pola Distribusi Perdagangan						√	√					
29	Survei BCS									√	√		
30	VUPE/Pemutakhiran Perusahaan/Usaha Perdagangan Tahun 2020								√	√	√		
31	Survei e-commerce							√	√	√			
32	VREST-UMK (Updating)							√	√				
33	VREST-UMK (Sampel)									√	√		
<b>Neraca Wilayah dan Analisis Statistik</b>													
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha	√	√										
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran		√	√									
3	Penyusunan Statistik Daerah									√	√	√	
4	Penyusunan Inkesra										√	√	√
5	Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)	√			√			√			√		

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Survei Khusus Pariwisata Berkelanjutan								√	√			
7	SKPR Dinas	√											
8	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)				√			√			√		√
9	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPR)				√			√			√		√
10	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)								√	√			
11	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)						√	√	√	√			
12	Survei Khusus Neraca Produksi								√	√			
13	Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (SKPS)							√	√	√	√	√	
14	Pengumpulan data realisasi APBD	√			√			√			√		
15	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)							√	√	√			
16	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)						√	√	√	√			
17	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha							√	√	√			
18	Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ)								√	√			
19	Updating LNP										√	√	
20	Pengumpulan Data PDAM	√			√			√			√		
21	Pengumpulan Fenomena Triwulanan	√			√			√			√		

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik</b>													
1	Pengolahan Sakernas			√						√			
2	Pengolahan Susenas				√						√		
3	Clustering Peta BS					√	√	√	√				
4	Penyusunan DDA	√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Penyusunan KCDA			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Pemutakhiran MFD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pendataan SKD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	Pendataan Metadata				√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Pengolahan SP2020											√	√

**Lampiran 6. Target – Realisasi Kegiatan/Response Rate Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2020**

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Statistik Sosial</b>					
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	54	54	100
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	540	540	100
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	Dokumen	81	81	100
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan	Dokumen	810	810	100
5	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020	Dokumen	108	108	100
6	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020	Dokumen	1.080	1.080	100
7	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020	Dokumen	27	27	100
8	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020	Dokumen	270	270	100
9	Survei Statistik Polkam	Dokumen	7	7	100
10	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020	Dokumen	160	160	100
11	Pendataan Potensi Desa (PODES2020- Desa)	Dokumen	280	280	100
12	Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020	Peta	10.757	10.757	100
<b>Statistik Produksi</b>					
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)	Dokumen	1372	1372	100
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	Dokumen	396	228	57,58
3	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Tahunan	Dokumen	1372	352	25.66
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan	Dokumen	533	533	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
6	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	Dokumen	428	428	100
7	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)	Dokumen	2712	2712	100
8	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)	Dokumen	60	60	100
9	Survei Peternakan Tahunan (LTS)	Dokumen	2	2	100
10	Survei Peternakan Tahunan (LTT)	Dokumen	5	5	100
11	Survei Peternakan Tahunan (LTU)	Dokumen	5	5	100
12	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Listing	Dokumen	58	58	100
13	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Pencacahan	Dokumen	289	26	12.5
14	Survei Hortikultura	Dokumen	3	3	100
15	Survei Konstruksi Triwulanan	Dokumen	12	8	66,67
16	Survei SP-Lahan	Dokumen	31	31	100
17	Survei SP- Benih	Dokumen	31	31	100
18	Survei SP- Alsin	Dokumen	31	31	100
19	Survei SP Padi	Dokumen	372	372	100
20	Survei SP Palawija	Dokumen	372	372	100
21	Survei SPH-Lahan	Dokumen	31	31	100
22	Survei SPH- SBS	Dokumen	372	372	100
23	Survei SPH-BST	Dokumen	124	124	100
24	Survei SPH-TH	Dokumen	124	124	100
25	Survei SPH-TBF	Dokumen	124	124	100
26	Survei SPH-Benih	Dokumen	31	31	100
27	Survei LITBANG	Dokumen	7	7	100
31	Survei Kostruksi Tahunan	Dokumen	17	8	47,06
32	Updating Direktori Konstruksi	Dokumen	50	50	100
33	Survei Captive Power	Dokumen	14	14	100
34	Survei Penggalan Berbadan Hukum	Dokumen	9	8	88,89
35	Survei Penggalan Usaha Ruamahtangga (URT)	Dokumen	26	26	100
36	Survei Energi Listrik	Dokumen	2	1	50
<b>Statistik Distribusi</b>					
1	HPB / Harga Perdagangan Besar	Dokumen	264	264	100
2	HPB (Khusus Hari Raya, Natal &	Dokumen	18	18	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
	Tahun Baru)				
3	IKK / Indeks Kemahalan Konstruksi	Dokumen	48	48	100
4	SHPed / Harga Produsen Pedesaan	Dokumen	216	216	100
5	SHPed / Harga Konsumen Pedesaan	Dokumen	72	72	100
6	HPG / Monitoring Harga Produsen Gabah	Dokumen	156	156	100
7	HPBG / Harga Beras di Penggilingan	Dokumen	84	84	100
8	HP	Dokumen	852	680	79,81
9	HPJ	Dokumen	24	24	100
10	HPT	Dokumen	24	24	100
11	HP (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)	Dokumen	2	2	100
12	Survei Keuangan TK II - APBD 2	Dokumen	1	1	100
13	Survei Keuangan TK II - K2	Dokumen	1	1	100
14	Survei Keuangan TK Desa - K3	Dokumen	27	27	100
15	Survei Lembaga Keuangan -	Dokumen	35	33	94,29
16	VHT-L/ Suvei Hotel Tahunan	Dokumen	107	87	81,31
17	VHT-S / Survei Tingkat Penghunian Kamar	Dokumen	384	366	87,14
18	PJ II-5	Dokumen	1	1	100
19	AJR II-2	Dokumen	1	1	100
20	AJR II-3	Dokumen	1	1	100
21	STKU / Survei Triwulanan Kegiatan Usaha	Dokumen	10	5	50
22	Survei Penyusunan Direktori Pasar & Pusat Perdagangan	Dokumen	60	60	100
23	Survei Peningkatan Kualitas Data Ekspor	Dokumen	5	3	60
24	PAW / Survei Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	156	156	100
25	VREST/ Survei Usaha Restoran	Dokumen	39	31	91,55
26	VDTW/ Survei Daya Tarik Wisata	Dokumen	55	52	94,55
27	SHPI/Survei Harga Perdagangan Internasional	Dokumen	5	4	80
28	Poldis / Survei Pola Distribusi Perdagangan	Dokumen	40	40	100
31	Survei BCS	Dokumen	89	78	87,64
32	VUPE/Pemutakhiran Perusahaan/Usaha Perdagangan	Perusahaan	558	558	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
33	Survei e-commerce	Perusahaan	451	451	100
34	VREST-UMK (Updating)	Blok Sensus	24	24	100
35	VREST-UMK (Listing)	Perusahaan	108	108	100
<b>Neraca Wilayah dan Analisis Statistik</b>					
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha	Publikasi	1	1	100
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran	Publikasi	1	1	100
3	Penyusunan Statistik Daerah	Publikasi	1	1	100
4	Penyusunan Inkesra	Publikasi	1	1	100
5	Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)	Dokumen	20	20	100
6	Survei Khusus Pariwisata Berkelanjutan	Dokumen	5	5	100
7	SKPR Dinas	Dokumen	10	10	100
8	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)	Dokumen	120	120	100
9	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPR)	Dokumen	40	40	100
10	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)	Dokumen	10	10	100
11	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)	Dokumen	6	6	100
12	Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP)	Dokumen	19	19	100
13	Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (SKPS)	Dokumen	6	6	100
14	Pengumpulan data realisasi APBD	Dokumen	4	4	100
15	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)	Dokumen	30	30	100
16	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)	Dokumen	25	25	100
17	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha	Dokumen	7	7	100
18	Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ)	Dokumen	84	84	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
19	Updating LNP	Daftar	7	7	100
20	Pengumpulan Data PDAM	Data	4	4	100
21	Pengumpulan Fenomena Triwulanan	Daftar	4	4	100
<b>Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik</b>					
1	Pengolahan Sakernas	Dokumen	642	642	100
2	Pengolahan Susenas	Dokumen	1.584	1.584	100
3	Clustering Peta BS	SLS	19.050	19.050	100
4	Penyusunan DDA	Publikasi	1	1	100
5	Penyusunan KCDA	Publikasi	31	31	100
6	Pemutakhiran MFD (Master File Desa)	Desa	280	280	100
7	Pendataan SKD (Survei Kebutuhan Data)	Dokumen	30	39	120
8	Pendataan Metadata	Dokumen	30	30	100
9	Pengolahan SP2020	Dokumen	19.050	19.142	100.48

### Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2020

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
1	Kabupaten Bandung Dalam Angka 2020	Tahunan
2	Kabupaten Bandung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan	Tahunan
3	Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2020	Tahunan
4	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2020	Tahunan
5	Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2020	Tahunan
6	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2015-2019	Tahunan
7	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran 2015-2019	Tahunan
8	Kecamatan Ciwidey Dalam Angka 2020	Tahunan
9	Kecamatan Rancabali Dalam Angka 2020	Tahunan
10	Kecamatan Pasirjambu Dalam Angka 2020	Tahunan
11	Kecamatan Cimaung Dalam Angka 2020	Tahunan
12	Kecamatan Pangalengan Dalam Angka 2020	Tahunan
13	Kecamatan Kertasari Dalam Angka 2020	Tahunan
14	Kecamatan Pacet Dalam Angka 2020	Tahunan
15	Kecamatan Ibum Dalam Angka 2020	Tahunan
16	Kecamatan Paseh Dalam Angka 2020	Tahunan
17	Kecamatan Cikancung Dalam Angka 2020	Tahunan
18	Kecamatan Cicalengka Dalam Angka 2020	Tahunan
19	Kecamatan Nagreg Dalam Angka 2020	Tahunan
20	Kecamatan Rancaekek Dalam Angka 2020	Tahunan
21	Kecamatan Majalaya Dalam Angka 2020	Tahunan

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
22	Kecamatan Solokan Jeruk Dalam Angka 2020	Tahunan
23	Kecamatan Ciparay Dalam Angka 2020	Tahunan
24	Kecamatan Baleendah Dalam Angka 2020	Tahunan
25	Kecamatan Arjasari Dalam Angka 2020	Tahunan
26	Kecamatan Banjaran Dalam Angka 2020	Tahunan
27	Kecamatan Cangkuang Dalam Angka 2020	Tahunan
28	Kecamatan Pameungpeuk Dalam Angka 2020	Tahunan
29	Kecamatan katapang Dalam Angka 2020	Tahunan
30	Kecamatan Soreang Dalam Angka 2020	Tahunan
31	Kecamatan Kutawaringin Dalam Angka 2020	Tahunan
32	Kecamatan Margaasih Dalam Angka 2020	Tahunan
33	Kecamatan Margahayu Dalam Angka 2020	Tahunan
34	Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Angka 2020	Tahunan
35	Kecamatan Bojongsoang Dalam Angka 2020	Tahunan
36	Kecamatan Cileunnyi Dalam Angka 2020	Tahunan
37	Kecamatan Cilengkrang Dalam Angka 2020	Tahunan
38	Kecamatan Cimenyan Dalam Angka 2020	Tahunan

## Lampiran 8. Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2020

1. Piagam Penghargaan **Satker Terbaik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 milyar rupiah**. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2020



2. Piagam Penghargaan **Satker Terbaik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Miliar Rupiah**. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2020



3. Piagam Penghargaan **Satker Terbaik Bidang Statistik Sosial Kategori Pengelolaan DIPA di Atas 14 Milyar Rupiah**. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , pada tanggal 22 Desember 2020





# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG**



[bandungkab.bps.go.id](http://bandungkab.bps.go.id)



[BPS Kabupaten Bandung](#)



[bpskabbandung](#)